



**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA WONOASRI KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER**

*Headman's Leadership Manner In Organizing Village Government In Wonoasri
Village, Tempurejo Sub-District, Jember District*

SKRIPSI

Oleh

**Zulfa Mazidah
NIM. 140910201030**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA WONOASRI KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER**

*Headman's Leadership Manner In Organizing Village Government In Wonoasri
Village, Tempurejo Sub-District, Jember District*

SKRIPSI

Oleh

**Zulfa Mazidah
NIM. 140910201030**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA WONOASRI KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER**

*Headman's Leadership Manner In Organizing Village Goverment In Wonoasri
Village, Tempurejo Sub-District, Jember District*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**Zulfa Mazidah
NIM. 140910201030**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunian Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda Endang Susilowati Ningsih dan Ayahanda Dzulkifli, sebagai bhakti, hormat, dan rasa terima kasih yang senantiasa melantunkan doa, restu dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih bisa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena penulis sadar bahwa selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuat saya termotivasi untuk tetap bermanfaat bagi orang lain.
2. Semua guru saya, mulai dari TK Pertiwi Mangli, SD Negeri Mangli 1, SMP Negeri 6 Jember, SMA Negeri 5 Jember, dan Universitas Jember. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga.
3. Almamater saya Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya.

MOTTO

“Sungguh Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku, tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan kuberikan, insya Allah Subhanahuwata'ala, seratus persen kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan... dan jikalau aku misalnya diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa.”

(Ir Soekarno, Pidato di KBRI USA 1956)¹

al-Maidah Ayat 2, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Zahil. “tafsir surat al-maidah ayat 2”)²

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.”

(Jim Rohn)³

“Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati.”

(Copernicus [1473-1543], Pakar Astronomi Polandia)⁴

¹ diambil dari <https://id.wikiquote.org/wiki/Sukarno>

² diambil dari <https://cahayawahyu.wordpress.com/2018/06/23/tolong-menolong-taawun-menurut-pandangan-al-quran/#more-4224>

³ diambil dari <https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/>

⁴ diambil dari <https://ibenss.wordpress.com/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Mazidah

NIM : 140910201030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Zulfa Mazidah
NIM. 140910201030

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA WONOASRI KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER**

*Headman's Leadership Manner In Organizing Village Government In Wonoasri
Village, Tempurejo Sub-District, Jember District*

Oleh

**Zulfa Mazidah
NIM. 140910201030**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Sutomo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 18 Oktober 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP. 195607261989021001

Anggota

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

(.....)

Dr. Selfi Budi. H, M.Si
NIP. 197003221995122001

(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember; Zulfa Mazidah; 140910201030; 2018; 100 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala desa merupakan kepala pemerintah di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan, sehingga apabila kepala desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka akan berpengaruh juga pada pemerintahan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggotanya, untuk mencapai pelayanan dan tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan teori Robbins tentang teori gaya kepemimpinan yang terdiri dari teori sifat, teori perilaku dan teori situasional. Pada penelitian ini berfokus pada teori perilaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam motivasi dapat

di simpulkan kepala desa dalam hal ini sudah melakukan dengan baik, baik motivasi kepada para perangkat desa untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan dalam hal ini kepala desa sudah baik, hal ini di benarkan oleh informan yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang di lakukan oleh pemerintah bisa di katakan tepat sasaran. Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam bidang koordinasi bisa dikata sudah baik dalam hal ini koordinasi antara BPD dan perangkat desa dalam hal perencanaan.

PRAKATA

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari do'a, motivasi dan suntikan semangat dari kedua orang tua, dosen, sahabat, teman-teman, serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr.Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si dan Bapak Dr.Sutomo, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, sumbangsih pemikiran, semangat dan kesabarannya sehingga penulis mendapatkan asupan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu bapak mendapatkan manfaat dan keberkahan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administratif.
8. Bapak Mulyono, selaku operator program studi Ilmu Administrasi Negara.

Terima kasih atas kesabaran dalam setiap melayani segala urusan administratif selama ini. Semoga jasa dan dedikasi bapak yang luar biasa ini selalu mendapatkan keberkahan.

9. Seluruh narasumber, Bapak Sugeng Priyadi, Bapak Suharyono, Bapak Tusbani, Bapak Zein Luthfiari, dan para staf lainnya dan masyarakat Desa Wonoasri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua penulis, Ibunda Endang Susilowati Ningsih dan Ayahanda Dzulkipli yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat serta motivasi terbesar kepada penulis hingga saat ini. Semoga Ibu dan Ayah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
11. Keluarga besar Bapak Mentoba Sugit Tedjo Mulyono yang secara ikhlas menjadi orang tua kedua dan rumah kedua bagi penulis, serta memberikan dukungan, motivasi atas terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis “Team Halu”, Dwisma Agista Maulida, Oktavia Nabila Gaesani, Maraniga Putri Nurindra. “Kare Desa”, Lita Ana Saputri, Avindya Putri Rarasati, Arini Hidayati, Intan Weni Andara Darma Putri. “ZEENOID”, Zsekhar Mehta Pradipta Yudah, Edwin Oktavian Mahendra yang menjadi sahabat terbaik penulis hingga sekarang. Persahabatan yang tidak ternilai dengan apapun. Terima kasih atas persahabatan, canda, tawa, kekonyolan yang kalian berikan selama ini, bahkan tangis dalam setiap perjuangan dan pembelajaran selama ini.
13. Sahabat penulis di “Rumah Biru”, spesial terima kasih kepada Winda Rossalia, Eka Serli Haniah Oktahana, Ridho Afrianto, Dimas Baskoro, Muh. Fathikun Nada, Crystal Erawati, Karomatul Afidah, Aprilia Nurlaily Utami yang menjadi keluarga sejak mahasiswa baru. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, perjuangan selama ini. Semoga proses pembelajaran yang kita jalani memberikan manfaat dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
14. Teman-teman dekat penulis yang telah banyak membantu, Siti Jahro,

Dhana Febrian Safitri, Febri Subachtiar, Andita Purnama Sari, Yogi Haqiqi, Moch Irfan Efendi, Agung Laksono, Pravita Yonika Aulia, Laily Mutmainah, Frieda Julianti. Terima kasih atas proses pembelajaran yang bermanfaat selama ini.

15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin mulai dari semester satu hingga sekarang.
16. Teman-teman penulis sejak bersekolah di TK Pertiwi Mangli, SD Negeri Mangli 1, SMP Negeri 6 Jember, SMA Negeri 5 Jember.
17. Ruang proses penulis di kampus, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Himaistra) dan Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (Limas), proses yang menjadikan penulis matang dalam berorganisasi di dunia kampus. Terima kasih atas proses yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.

Semoga kebaikan berbagai pihak tersebut memperoleh balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat. Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu 'alaikum Wr.Wb

Jember, 18 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Kepemimpinan	10
2.1.1 Definisi Kepemimpinan	10
2.1.2 Macam-Macam Gaya Kepemimpinan	12
2.1.3 Teori Gaya Kepemimpinan	22
2.1.4 Kepemimpinan Kepala Desa.....	24
2.2 Konsep Penyelenggaraan Pemerintah	25
2.2.1 Pemerintah Desa.....	25
2.2.2 Kepemimpinan Kepala Desa.....	30
2.3 Konsep Pembangunan	35
2.3.1 Pembangunan Desa	36

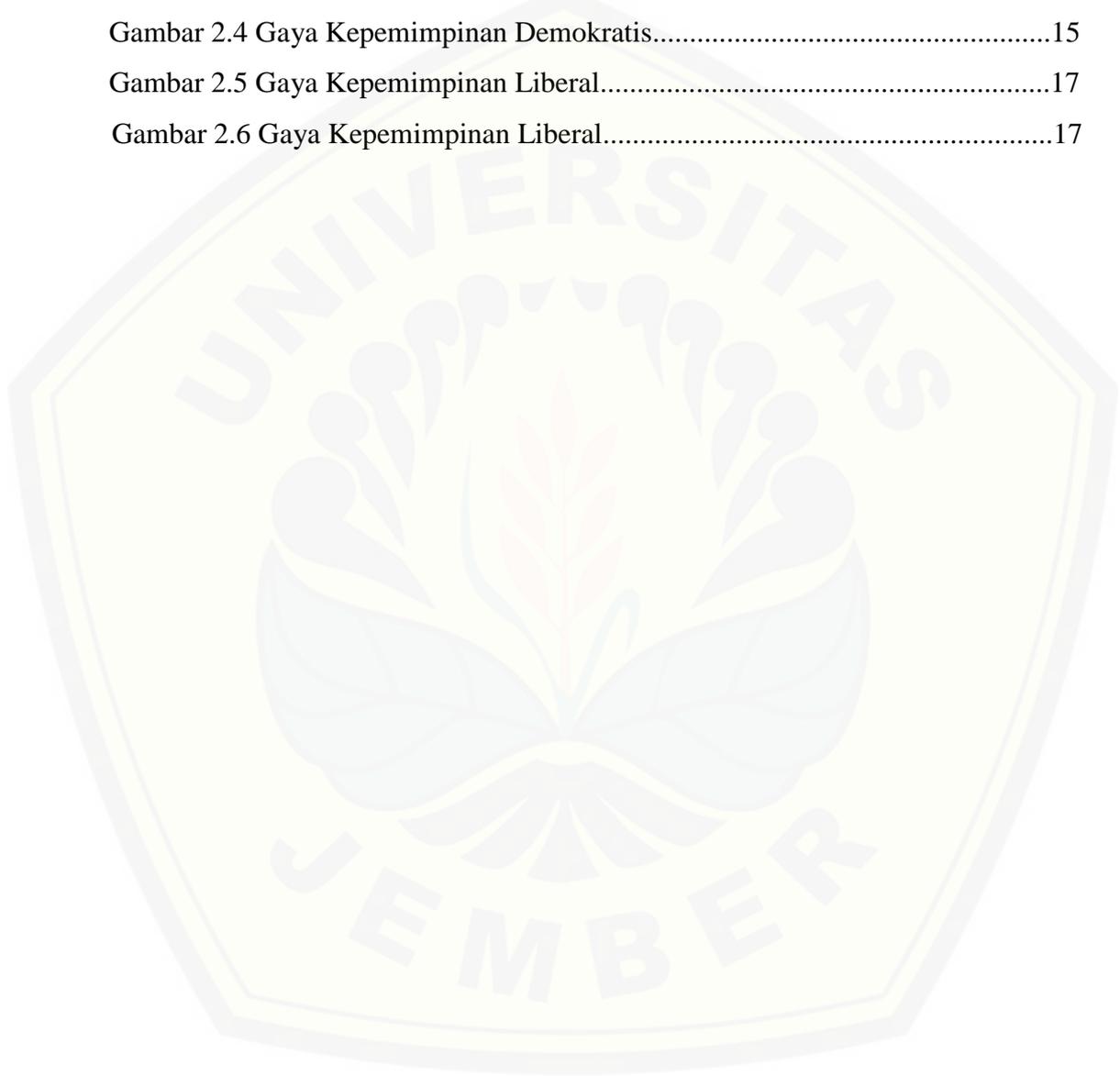
2.4	Penelitian Terdahulu	37
2.5	Kerangka Berfikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3	Fokus Penelitian	42
3.4	Data dan Sumber Data	42
3.5	Penentuan Informan Penelitian	44
3.6	Teknik dan Alat Perolehan Data	45
3.7	Teknik Penyajian dan Analisis Data	47
3.8	Teknik Menguji Keabsahan Data	49
BAB 4. PEMBAHASAN		51
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	51
4.1.1	Sejarah Desa Wonoasri	51
4.1.2	Kondisi Sosial	52
4.1.3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	53
4.1.4	Visi Dan Misi	55
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian	56
4.2.1	Pembangunan Desa	65
4.2.2	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Wonoasri	75
4.2.3	Proses Pengambilan Keputusan	83
4.2.4	Verifikasi Data	91
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prestasi Desa Wonoasri.....	2
Tabel 1.2 Realisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wonoasri.....	4
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1 Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonoasri.....	54
Tabel 4.2 Masalah Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah.....	56
Tabel 4.3 Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	57
Tabel 4.4 Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	58
Tabel 4.5 Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	61
Tabel 4.6 Capaian di Bidang Pembangunan.....	67
Tabel 4.7 Hasil di Bidang Pembangunan.....	71
Tabel 4.8 Daftar Usulan Musdes Desa Wonoasri Tahun 2016-2021.....	77
Tabel 4.9 Verifikasi Data Terhadap Gaya Kepemimpinan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gaya Kepemimpinan Otoriter.....	13
Gambar 2.2 Gaya Kepemimpinan Otoriter.....	13
Gambar 2.3 Gaya Kepemimpinan Demokratis.....	15
Gambar 2.4 Gaya Kepemimpinan Demokratis.....	15
Gambar 2.5 Gaya Kepemimpinan Liberal.....	17
Gambar 2.6 Gaya Kepemimpinan Liberal.....	17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran III	: Surat Izin Penelitian dan Lembaga Penelitian Universitas Jember
Lampiran IV	: Surat rekomendasi dari Bakesbangpol
Lampiran V	: SK Kepala Desa
Lampiran VI	: Piagam Penghargaan
Lampiran VII	: SK Penghargaan
Lampiran VIII	: Berita Acara Rapat Rutin Desa
Lampiran IX	: RPJM Desa Wonoasri

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan aparat dan anggota masyarakatnya. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada struktur organisasi, seorang kepala desa di bantu oleh sekertaris desa dimana gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin dapat mempengaruhi partisipasi pegawai dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu gaya kepemimpinan sebagai peran penting dalam setiap organisasi atau lembaga karena setiap lembaga mempunyai masing-masing pemimpin. Salah satu pemimpin yang mampu menjadi penggerak bagi bawahannya yaitu kepala desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, karena dari hasil penelitian bahwa Kepala Desa Wonoasri tersebut mencontohkan kepada perangkatnya untuk datang ke balai desa lebih awal yaitu pukul 07.00 WIB, supaya perangkat desa datang tepat waktu. Kemudian kegiatan yang dilakukan sharing dengan perangkat tentang kegiatan yang belum terlaksana dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Syarat untuk menjadi kepala desa di haruskan untuk memiliki sertifikat berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat. Kepala desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, merupakan kepala desa yang memiliki ijazah SMA namun memiliki inovasi, motivasi dan semangat dan harapan yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tampak dari hasil observasi dan wawancara penulis terhadap informan, dengan prestasi yang diraih disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Prestasi Desa Wonoasri

No.	Prestasi	Tahun
1.	Peringkat ke-6 atas prestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan Tingkat Kabupaten	2016
2.	Penghargaan terhadap TKW Desa Wonoasri (Berdirinya Desbumi)	2016
3.	PKK Desa Wonoasri Juara 1 Tingkat Kabupaten (Kampung KB)	2017
4.	Penghargaan DESTANA (Desa Tangguh Bencana) Juara Tingkat Kabupaten	2018

Sumber: Observasi dan Wawancara, 2018 (data diolah)

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tempurejo yang memiliki kategori desa swadaya. Hal ini berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2016. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Tipe atau bentuk desa yang berada pada tingkat yang lebih baik disebut swadaya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa melakukan kegiatan Rapat Rutin yang di laksanakan setiap Hari Senin. Saat kepala desa memimpin rapat mengenai agenda desa. Kepala desa memberikan kesempatan untuk berpendapat kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi di dalam rapat, hal tersebut ditunjukkan dengan cara mengusulkan pendapat kemudian perangkat desa beserta beberapa tokoh masyarakat mengevaluasi hasil keputusan kepala desa dan kegiatan yang terlaksana. Semua di musyawarahkan dalam forum, sehingga hasil rapat tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada Rapat Rutin Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018 yang disampaikan oleh Ketua RW.02, bahwa terdapat permasalahan mengenai Kartu Tani yang masih nol (0) karena PPLnya baru dan pembangunan bantuan irigasi sudah mencapai 60%. Dengan adanya partisipasi tersebut dapat memberikan keuntungan kepada kepala desa dan anggota yang hadir dalam rapat

berupa tambahan informasi mengenai bagaimana permasalahan yang ada di desanya, dan sejauh mana pembangunan yang sudah terlaksana.

Adanya partisipasi perangkat desa dan masyarakat di Desa Wonoasri dapat terlaksana jika kepala desanya dapat mempengaruhi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah Desa Wonoasri dikatakan sebagai desa maju (data observasi, 2018) karena meskipun desa tersebut memiliki sedikit Tanah Kas Desa (TKD), namun Desa Wonoasri mampu memberdayakan masyarakatnya untuk memajukan desanya. Oleh karena itu penerapan suatu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa akan berpengaruh terhadap tujuan pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah desa.

Berbagai bentuk capaian yang telah diraih Desa Wonoasri ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala Desa Wonoasri tidak hanya sekedar memberi arahan kepada warganya untuk melaksanakan kegiatan, beliau juga selalu mendengarkan atau memberi kesempatan kepada bawahan dan warganya untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik dalam kegiatan pemerintahan yang akan maupun yang telah dilaksanakan di desanya. Kepala Desa Wonoasri selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada hakikatnya pengikut (bawahan) memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini akan memberikan pilihan situasi bagi pemimpin yakni kepala desa dalam berkomunikasi dengan bawahan, menerima pendapat bawahan, dan memberikan wewenang.

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin mampu untuk mempengaruhi perilaku individu yang lain maka pemimpin tersebut tentu memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan kepala desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo di mulai sejak tahun 2015 melalui pemilihan kepala desa serentak. Berikut merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonoasri yang disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Realisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wonoasri

Bidang	Terlaksananya Kegiatan	
	Ya	Tidak
a. Penetapan dan Penegasan Kebijakan Desa	√	
b. Pendataan dan pengarsipan desa	√	
c. Penyusunan tata ruang desa	-	
d. Penyelenggaraan musyawarah desa	√	
e. Pengelolaan pengembangan informasi desa	√	
f. Penyelenggaraan perencanaan desa	√	
g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa	√	
h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa	-	
i. Operasional pemerintahan desa	√	
j. Pembentukan dan peningkatan kapasitas BPD	√	
k. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	√	

Sumber: RPJM Desa Wonoasri, 2018 (data diolah)

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui dari sebelas bidang kegiatan yang direncanakan sebanyak sembilan bidang kegiatan telah terlaksana. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi aparat dan warga Desa Wonoasri atas pengaruh kepemimpinan kepala desa, karena kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Trisantono (2011:185) Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan desa yaitu: a) Urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan deaa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah, dan kerja sama antar

desa; b) Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa; c) Urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Kepala desa merupakan suatu konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus bisa menjalankan dua peran, yaitu kepala desa harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah dan sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk untuk mengkaji Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Akbar (2006:16), masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2017:52), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah penelitian menurut Kountur (2004:35) yaitu suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah penelitian tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa masalah penelitian merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang dirumuskan karena adanya perbedaan antara kondisi ideal

dengan kenyataan untuk kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan ditemukan kebenarannya.

Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian tersebut, peneliti menemukan suatu permasalahan “Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah pada saat seorang peneliti melakukan aktivitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar dari tujuan-tujuan yang ditentukan. Tujuan penelitian menurut Arikunto (2000:22) Tujuan Penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal diperoleh setelah peneliti selesai, dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian yang sama dengan jawaban dari problematika penelitian, yang berbeda dalam rumusnya.

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya untuk menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dan mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait.

2. Secara Akademis

Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi negara yang bersifat teori maupun praktik mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan juga memberikan pengetahuan dan membantu peneliti untuk belajar membuat karya ilmiah terkait Kepemimpinan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menambah argumentasi peneliti dalam melihat secara utuh obyek permasalahan. Untuk membangun kerangka berfikir secara utuh tersebut maka diperlukan juga konsep agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang jelas. Konsepsi dasar merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena digunakan sebagai referensi dan bukti nyata tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti agar peneliti memiliki dasar yang kuat. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:3) konsep dalam sebuah penelitian digunakan oleh peneliti untuk memudahkan mereka dalam menyederhanakan pemikirannya. Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang di bahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Selanjutnya melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Konsepsi dasar merupakan alat sebagai pedoman atau pegangan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi didalam obyek penelitian. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan teori dengan observasi, antara abstraksi dengan realitas. Dalam pemikiran sosial, peranan ini menjadi sangat penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

Menurut Suprayogi (2011:2) administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. Administrasi menekankan kepada kegiatan pengkoordinasian orang-orang yang berkerjasama, alat-alat dan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi

memegang peranan yang sangat penting pada suatu organisasi atau organisasi untuk memperlancar jalannya kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya kegiatan administrasi suatu organisasi dipergunakan untuk menyelesaikan segala pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan administrasi disini sangat diperlukan oleh organisasi tersebut karena pekerjaan organisasi membantu memberi data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menjalankan manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi yang diharapkan, maka keberadaan dari sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan mampu menunjukkan suatu *performance* yang terbaik yang dapat ditunjukkan oleh pegawai tersebut. Selain itu *performance* yang ditunjukkan oleh seorang pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang penting, bagi peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari organisasi pegawai tersebut bekerja.

Peranan yang sangat penting pada suatu organisasi atau organisasi untuk memperlancar jalannya kegiatan dalam mencapai tujuan. Ple dalam Mangkunegara (2006:27) faktor kinerja terdiri dari dua faktor yaitu Faktor Internal yang terkait dengan sifat-sifat seseorang misalnya kinerja baik disebabkan mempunyai kemampuan tinggi dan tipe pekerja keras. Faktor Eksternal yang terkait dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan peran teori dan konsep sangat penting sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka konsepsi dasar yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Konsep Kepemimpinan
2. Konsep Penyelenggaraan Pemerintah
3. Konsep Pembangunan

2.1 Konsep Kepemimpinan

2.1.1 Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan kepemimpinan. Kepemimpinan merujuk pada proses, kegiatan, sedang pemimpin merujuk pada kepribadian seseorang.

Definisi kepemimpinan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut House dalam Gary Yukl (2009:4) mengatakan Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Jadi dari pendapat House dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi untuk keberhasilan organisasi.

Sedangkan Terry dalam Wahjosumidjo (1994:25) menyatakan bahwa *“Leadership is the activity of influencing exercised to strive willingly for group objectives”* (Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok). Dari pendapat Terry dapat diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Menurut Dubin dalam Wahjosumidjo (1994:21) *“Leadership is the exercises of authority and the making of decisions”* (Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan). Dari pendapat Dubin dapat diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam membuat suatu keputusan.

Selanjutnya menurut Stogdill dalam Stonner (2003:161) Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Dari pendapat Stogdill dapat ditarik suatu pendapat bahwa kepemimpinan itu merupakan upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok. Sehingga menurut Sutikno (2014:26) Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang

yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang memimpinnya.

Margono Slamet (1999:1) tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahan. Selanjutnya menurut Edward Deming dalam Margono Slamet (1999:1) adalah melembagakan kepemimpinan yang membantu setiap orang dalam organisasi untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, memfasilitasi, membantu mengatasi kendala, dan lain sebagainya. Upaya suatu organisasi untuk meningkatkan mutu kinerjanya memerlukan adanya kepemimpinan yang selalu memotivasi anggota-anggota lain dari organisasi itu untuk selalu memperbaiki mutu kerjanya. Berdasarkan definisi kepemimpinan di atas dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, mengendalikan orang lain atau bawahannya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan berkontribusi dalam mencapai suatu tujuan.

Setelah menguraikan pengertian tentang kepemimpinan, selanjutnya menjelaskan definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Menurut Thoah (2013:49) bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Sedangkan Rivai (2014:16) menyatakan Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Selanjutnya menurut Stonner (1996:165) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan

adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2 Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

Keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang macam-macam gaya kepemimpinan, menurut Ronald Lippitt dan Ralph K. White dalam Sutarto (2012:60) mengemukakan pendapat tentang macam-macam gaya kepemimpinan, sebagai berikut:

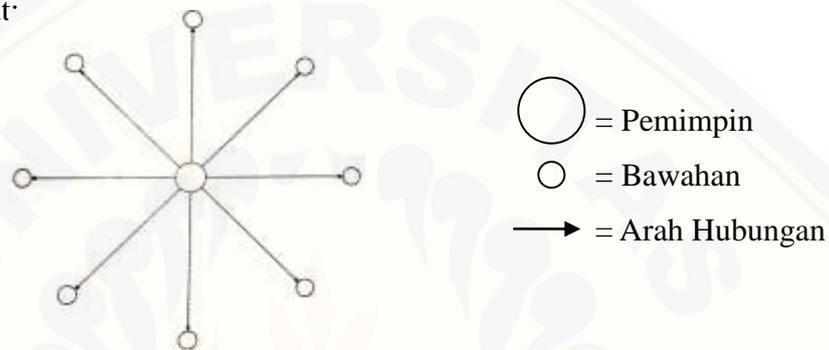
1. Kepemimpinan Gaya Otoriter

Kepemimpinan gaya otoriter, otokratis, atau diktator adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin semata-mata. Kepemimpinan gaya otoriter antara lain berciri:

- 1) Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin
- 2) Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin
- 3) Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin
- 4) Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan
- 5) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat
- 6) Prakarsa harus selalu datang dari pimpinan
- 7) Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 8) Tugas-tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif
- 9) Lebih banyak kritik daripada pujian
- 10) Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat
- 11) Pimpinan menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat

- 12) Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman
- 13) Kasar dalam bertindak
- 14) Kaku dalam bersikap
- 15) Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pimpinan

Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Sutarto (2012:16) kepemimpinan gaya otoriter ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gaya Kepemimpinan Otoriter

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Apabila ditunjukkan dalam struktur organisasi, kepemimpinan gaya otoriter akan nampak sebagai bagan di bawah ini:



Gambar 2.2 Gaya Kepemimpinan Otoriter

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Penerapan kepemimpinan gaya otoriter dapat mendatangkan keuntungan antara lain berubah kecepatan, serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara mungkin produktifitas dapat naik. Tetapi penerapan kepemimpinan gaya otoriter dapat menimbulkan kerugian antara lain berupa suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut timbulnya ketidakpuasan. Dalam hal ini Agarawal berpendapat bahwa “penerapan kepemimpinan gaya otoriter ternyata mengakibatkan merusak moral,

meniadakan inisiatif, menimbulkan permusuhan, agresivitas, keluhan, absen, pindah, dan tidak puas”.

Kepemimpinan gaya otoriter hanya tepat diterapkan dalam organisasi yang sedang menghadapi keadaan darurat karena sendi-sendi kelangsungan hidup organisasi terancam, apabila keadaan darurat telah selesai gaya ini harus segera ditinggalkan.

2. Kepemimpinan Gaya Demokratis

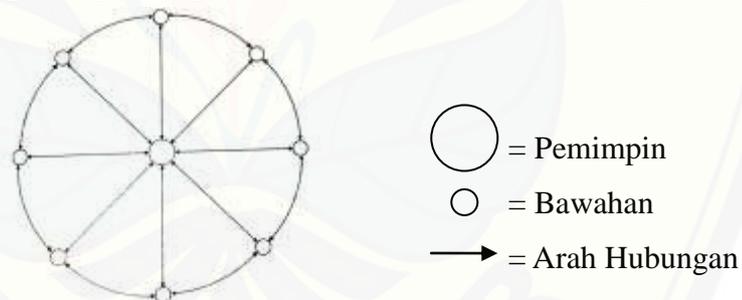
Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri:

- 1) Wewenang pimpinan tidak mutlak
- 2) Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan
- 3) Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 4) Kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 5) Komunikasi berlangsung timbal-balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan
- 6) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar
- 7) Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan
- 8) Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 9) Tugas-tugas kepala bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan daripada instruktif
- 10) Pujian atau kritik seimbang
- 11) Pemimpin mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing
- 12) Pemimpin meminta kesetiaan para bawahan secara wajar
- 13) Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak

- 14) Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai
- 15) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan

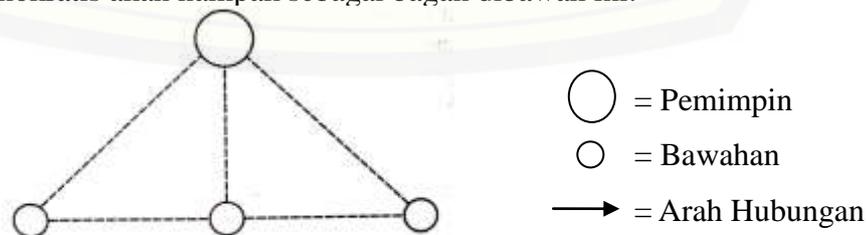
Herbert G. Hicks dan Ray C. Gullett dalam Kartono (2012:24) menyatakan bahwa dengan kepemimpinan gaya demokratis keluaran mungkin tidak setinggi pada gaya otoriter, namun kualitas lebih baik, dan masalah saling berpendapat, semua orang dianggap sama penting dalam menyumbangkan ide dalam pembuatan keputusan. Sharma dalam Kartono (2012:86) memberikan pandangan yang senada juga mengenai gaya demokratis, yaitu dalam gaya demokratis pemimpin memerhatikan pandangan bawahan, memberikan bimbingan pada masalah-masalah yang timbul, dan melibatkan perasaan sendiri dalam membantu bawahan mencapai tujuan organisasi sebaik tujuan individu.

Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Kartono (2012:18) kepemimpinan gaya demokratis ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut



Gambar 2.3 Gaya Kepemimpinan Demokratis
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Apabila ditunjukkan dalam struktur organisasi, kepemimpinan gaya demokratis akan nampak sebagai bagan dibawah ini:



Gambar 2.4 Gaya Kepemimpinan Demokratis
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

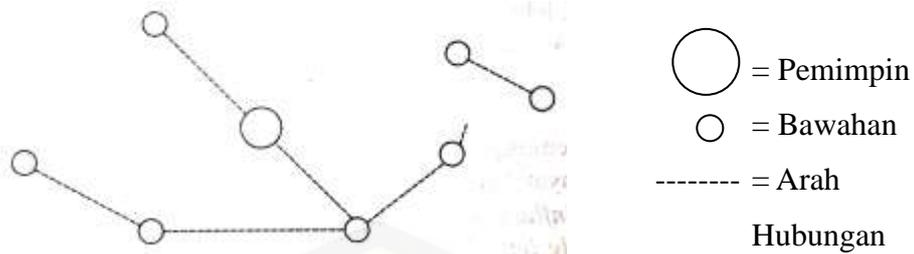
Penerapan kepemimpinan gaya demokratis dapat mendatangkan keuntungan antara lain berupa keputusan serta tindakan yang lebih obyektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedang kelemahan gaya ini antara lain keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, keputusan yang dibuat bukan merupakan keputusan terbaik.

3. Kepemimpinan Gaya Liberal

Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Kepemimpinan liberal antara lain berciri:

- 1) Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
- 2) Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- 3) Kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- 4) Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya
- 5) Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan para bawahan.
- 6) Prakarsa selalu datang dari bawahan
- 7) Hampir tiada pengarahan dari pimpinan
- 8) Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok
- 9) Kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan kelompok
- 10) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang

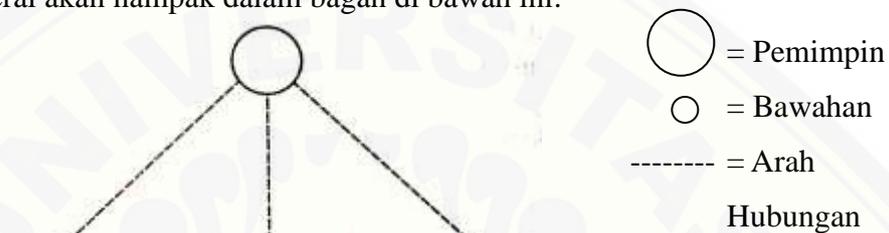
Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Kartono (2012:21) kepemimpinan gaya liberal ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.5 Gaya Kepemimpinan Liberal

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Apabila ditunjukkan dalam struktur organisasi, kepemimpinan gaya liberal akan nampak dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.6 Gaya Kepemimpinan Liberal

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Penerapan pemimpin gaya liberal dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan jenis ini membawa kerugian bagi organisasi antara lain berupa kekacauan karena setiap pejabat bekerja menurut selera masing-masing.

a) Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan (2007:170) Gaya Kepemimpinan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan.

2. Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.
 3. Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin bersikap menyerahkan dan mengatakan kepada bawahan inilah pekerjaan yang harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini bawahan dituntut memiliki kematangan dalam pekerjaan (kemampuan) dan kematangan psikologis (kemauan). Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kematangan psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan keterikatan.
- b) Gaya kepemimpinan menurut Sutikno (2014:35) mengatakan gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan atau sering disebut Tipe

Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaanya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Otokratik, tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya, dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.
2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (*Laissez Faire*), tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.
3. Tipe Paternalistik, persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi

kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi.

4. Tipe Kharismatik, seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki kharisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar.
5. Tipe Militeristik, pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya.
6. Tipe Pseudo-demokratik, tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya dan setelah itu membuat sebuah panitia, dengan berpura-pura untuk berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otoriter. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar.

7. Tipe Demokratik, tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis dan bukan karena dipilihnya sipemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepemimpinan, peneliti mengambil fokus terhadap teori Ronald Lippitt dan Ralph K. White dalam Sutarto (2012). Hal tersebut dikarenakan menurut Mulyadi dan Rivai (2009:2) memaparkan bahwa pemimpin dalam kepemimpinannya perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan kepada pegawainya. Gaya kepemimpinan yaitu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan atasan dapat mempengaruhi kesuksesan pegawai dalam berprestasi.

Kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni pimpinan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara suka rela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Setiap pemimpin akan menjalankan gaya kemampuan sesuai dengan kemampuan, kepribadian dan lingkungannya. Gaya kepemimpinan menurut Lippitt dan White terbagi menjadi gaya kepemimpinan otokratik, demokratik dan *laissez faire*.

2.1.3 Teori Gaya Kepemimpinan

Menurut Vietzal Rivai (2008:30) dalam buku Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi mengatakan ada beberapa teori yang mendukung dari diri seorang pemimpin, teori tersebut antara lain adalah:

- a) Teori Sifat, merupakan teori yang menjelaskan Sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang akan mewarnai tingkah laku, perbuatan, tindakan dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sifat merupakan tumpuan dan modal dasar untuk memberikan energi dalam kepemimpinannya. Pemimpin dapat mencapai efektifitas dengan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki.
- b) Teori Perilaku, dalam teori ini perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan meraih keefektifan dalam memimpin. Teori ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu: fungsi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Terdapat dua fungsi kepemimpinan, yaitu: a. Fungsi yang berorientasi tugas; b. Fungsi yang berorientasi orang atau pemeliharaan kelompok (sosial).
- c) Teori Kepemimpinan Situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

Model perilaku ini menarik perhatian tekanan utama dari teori ini terletak pada perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Efendi (2015:158), perilaku kepemimpinan ada tiga dimensi, yang didasarkan pada hubungan antara tiga faktor, yaitu perilaku tugas (*Task behavior*), perilaku hubungan (*relationship behavior*) dan kematangan (*maturity*). Perilaku tugas merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bilamana, dan bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara ketat. Perilaku hubungan merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin melalui

komunikasi dua arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah. Adapun kematangan adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat kematangan anak buah merupakan faktor yang paling dominan.

Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin, baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya maka dapat menciptakan efektivitas organisasi.

Menurut Andang (2014:159) Perilaku kepemimpinan tersebut, yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Perilaku kepemimpinan tersebut, masing-masing memiliki ciri pokok sebagai berikut:

- a. Perilaku Instruktif; terbangunnya komunikasi satu arah, pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat.
- b. Perilaku Konsultatif; pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan, telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan, bantuan terhadap bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin.
- c. Perilaku Partisipatif; control atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi dua arah semakin meningkat, pemimpin semakin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya, keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah.

- d. Perilaku Delegatif; pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan, bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri.

Seorang pemimpin dalam melakukan tugas kepemimpinannya dengan menggunakan gaya dan tipe kepemimpinan tertentu mempunyai karakteristik tersendiri. Seorang pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kebiasaan sendiri yang khas sehingga dengan tingkah laku dan gayanya sendiri membedakan dirinya dengan orang lain. Tipe kepemimpinannya tersebut pasti akan mewarnai perilaku kepemimpinan.

2.1.4 Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik.

Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

2.2 Konsep Penyelenggaraan Pemerintah

Desentralisasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Menurut Juli Panglima Siragih, terdapat perbedaan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Karena dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan otonomi daerah berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Dengan desentralisasi maka akan berkurangnya sebagian atau seluruh wewenang pusat karena diserahkan ke daerah, sedangkan daerah yang menerima penyerahan itu bersifat otonom yaitu dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.

2.2.1 Pemerintah Desa

Berbicara tentang Pemerintahan Desa, tentu tidak lepas dari keberadaan undang-undang yang mengaturnya serta paradigma yang melatar belakanginya. Dari undang-undang dan paradigma tersebut, dapat dilihat bagaimana tata pemerintahan desa di set-up. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Prijono & Yumiko (1994: 20) paradigma biasa dikategorikan sebagai bingkai *atau framework atau rule of the game* yang akan menjadi acuan suatu organisasi menuju masa depan yang di inginkan. Paradigma merupakan landasan untuk

mewujudkan suatu visi yaitu gambaran keberhasilan yang akan dicapai suatu organisasi dimasa depan.

Menurut Surbakti (2008:94) Rezim Orde Baru menggunakan paradigma kekuasaan yang “satu, terpusat dan seragam” dalam tiga wujud. Pertama, sentralisasi kekuasaan pada Pusat, Eksekutif dan Presiden yang merupakan prakondisi bagi stabilitas politik. Stabilitas merupakan *condition qua non* bagi kesuksesan pembangunan. Kedua, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal yang merupakan prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, sentralisasi redistribusi kekayaan nasional untuk menjamin pemerataan dan keadilan.

Dalam sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, dan top-down, menjadikan desa sebagai ujung tombak dan obyek program, dan proyek nasional yang sektoral yang dirancang oleh birokrasi terpusat. Artinya dalam hal implementasi kebijakan, program dan proyek Departemen dan Lembaga Non Departemen (LND) pada ujung pelaksanaannya ada di tingkat desa. Dengan begitu program dan proyek pemerintah pusat dilaksanakan di desa. Ciri pokok dari pola hubungan yang hirarkis sentralistik dan top down pada umumnya berimplikasi dipakainya pola hubungan keagenan. Menurut Kavanagh dalam Sarundajang (2005:53), ada dua model utama dalam hubungan pemerintah pusat-daerah yakni *agency model* dan *partnership model*.

Ciri pokok model pelaksana (*agency model*) adalah “*central government has the power to create or abolish local government bodies and their powers. In this model, the national framework of a policy is established centrally and local authorities, with little scope discreation or variation*”. Kaitannya pemerintah desa dengan supra desa, maka ciri *agency model* yang menonjol adalah pemerintah desa, hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dibuat secara terpusat dengan diskresi yang sangat kecil dengan tanpa hak untuk berbeda. Implikasinya pemerintahdesa hanya berkedudukan sebagai obyek yang bergantung kepada pejabat birokrasi yang terpusat (supra desa). Implikasi pola keagenan yaitu menjadikan pemerintah desa bergantung kepada birokrasi pemerintah yang terpusat yang memiliki absorsi sumberdaya yang banyak.

Implikasi pola pola hubungan keagenan dalam sistem hirarkis sentralistis dalam pelayanan publik dan pola top down dalam hal pembinaan masyarakat dan dalam perencanaan pembangunan pada Era Orde Baru, pemerintah desa menerima beban berat yakni dituntut bisa melaksanakan program dan proyek yang datang dari supra desa. Realitas tersebut, menjadikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan desa ibarat piramida terbalik. Keseragaman dalam administrasi pemerintahan desa, baik tentang struktur organisasinya, administrasi perkantornya dan manajemen keuangannya yang berimplikasi tergerusnya nilai-nilai tradisional yang hidup dimasing-masing desa, seperti kegotong-royongan, kekerabatan dan permusyawaratan. Musyawarah adalah tradisi yang hidup dalam masyarakat nusantara dalam proses pengambilan keputusan. Di introdukirnya model pengambilan keputusan dalam suatu pranata yang seragam, mengakibatkan memudarnya nilai-nilai tradisional dalam bermusyawarah mengambil keputusan.

Desa merupakan garda depan dalam perspektif pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan. Artinya dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, keberadaan pemerintahan desa, merupakan ujung tombak dari pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan. Dari segi kesejarahannya, di Indonesia menurut Suryaningrat (1976:13) telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang disebut hak otonomi atau otonomi menurut hukum adat. Karena itu menurut Sumardjan (1992:54) Desa tumbuh menjadi wadah kesadaran dan kesatuan pemerintahan yang dijiwai oleh adat yang kuat, mampu menjadikan dirinya sebagai “*dorps republiek*” yang berdasarkan adat penuh berkuasa dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Terkait dengan perkembangan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom itulah, seringkali menjadi acuan, bahwa kita memiliki model demokrasi asli. Sebutan lain desa di Indonesia yakni desa (Jawa) dan negari, dusun, marga (luar Jawa). Setelah dasa warsa 1960-an dengan dicabutnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, kemudian diganti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sistem

pemerintahan desa mengalami perubahan substansial sebagai masa memudarnya otonomi desa dan demokrasi tradisional dengan mengetatnya kontrol pemerintah pusat (*supra desa*) atas daerah pedesaan. Selanjutnya kemunduran Prijono & Yumiko (1994:2) Menguatnya intervensi dari atasan desa (*supra-village*), menyebabkan melemahnya wewenang tradisional kepala desa (*lurah*) untuk Jawa, sekaligus otonomi desa dan demokrasi desa mengalami.

Memudarnya otonomi desa dan demokrasi tradisional atau adat-istiadat yang di iringi oleh makin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat yang dipacu oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap wawasan masyarakat mengenai demokrasi. Dalam perkembangannya mengenai wawasan demokrasi, secara ekstrim melahirkan dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan referensinya.

Kelompok pertama, berpandangan bahwa kita memiliki model otonomi desa dan demokrasi asli (demokrasi lokal) yang kondusif bagi pengembangan demokrasi di Era Kesejagatan ini. Pandangan ini di ilhami oleh pendapat Mohammad Hatta (1970: 83) yang mengatakan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus bedasarkan pada demokrasi asli yang berlaku di desa. Kelompok kedua berpandangan, bahwa demokrasi merupakan konsep dan praktek dari negara-negara Barat (demokrasi ala barat). Perbedaan wawasan tersebut, akan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemerintahan desa dan model demokrasi yang dibangun serta perilakunya dalam proses demokratisasi.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati”. Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau

dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung-jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung-jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung-jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung-jawaban dimaksud. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No.47 Tahun 2015 BAB IV pasal 11 Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2015 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2.2.2 Kepemimpinan Kepala Desa

Adanya pendapat dari Soelaeman (2009:11) pengertian sosiologi, desa digambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, dimana mereka saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, ukuran komunitasnya tidak terlalu besar, penduduknya tidak padat, adat istiadat masih dipegang dengan kuat, mobilitas sosialnya rendah, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi.

Selanjutnya Soelaeman (2009:11) dalam pengertian sosiologi, desa digambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, dimana mereka saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, ukuran komunitasnya tidak terlalu besar, penduduknya tidak padat, adat istiadat masih dipegang dengan kuat, mobilitas sosialnya rendah, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi.

Setiap organisme pasti mempunyai kepala, kepala inilah yang berfungsi sebagai pengatur segala hal yang ada ditubuh yang dikepalainya. Lebih jauh, Ndraha (2003:212) menyatakan bahwa setiap organisme mempunyai suatu bagian yang berfungsi mengendalikan seluruh tubuh organisme itu. Bagian itu disebut

kepala. Bahkan setiap benda dianggap mempunyai kepala, misalnya kepala meja, kepala tongkat dan sebagainya. Sebuah organisasi adalah juga organisme hidup. Setiap organisasi atau unit kerja juga mempunyai kepala (*head*) yang diangkat oleh kepala yang lebih formal. Untuk bisa bekerja, kepala diberi atau memperoleh kekuasaan sah (*legitimate power*) yang disebut otoritas (*authority*) melalui cara tertentu: turun temurun (tradisi), diberi (kekuasaan dipersembahkan, dilimpahkan, dipilih, ditunjuk), berbagi (*sharing*), diakui (kesaktian, kehebatan, dipuji, dikultuskan, dipercayai), atau penaklukan melalui kekerasan.

Apabila kita kaitkan dan menganggap bahwa desa adalah suatu organism, maka desa mempunyai “kepala” yang mengatur segala sesuatu. Kepala itu disebut dengan kepala desa. Isitilah kepala ini pada umumnya berkaitan dengan arti konotasi adanya kedudukan dalam hirarki atau struktur organisasi, yang di dalamnya secara otomatis terkandung adanya fungsi, wewenang serta tanggung jawab. Dalam hubungannya kepemimpinan dengan pemerintahan maka Ndraha (2003:226) mengatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan didalam bidang pemerintahan, yang diwarnai oleh sifat-sifat khas bidang pemerintahan itu. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala kepemimpinan dengan gejala pemerintahan. Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari konsep yang berhubungan dengan kepemimpinan yang berhubungan dengan sistem nilai sosial, dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat, karena itu ia harus memilih peran sebagai kepala atau sebagai pemimpin.

Dalam hubungannya dengan kemampuan peran kepemimpinan bagaimana berperan, Selanjutnya Taliziduhu Ndraha (2003:28) mengemukakan bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang hubungannya satu dengan yang lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahn yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Ia harus memilih peran, sebagai kepala atau

sebagai pemimpin. Dilihat dari sudut itu, pada saat seseorang melakukan peran, ia harus mempertimbangkan peran lainnya. Peran apa mendukung peran apa, peran mana dapat menghambat peran mana, peran apa *conflicting* dengan peran apa dan seterusnya.

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan bawahannya. Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Trisantono (2011:185) Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan desa yaitu: a) Urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan deaa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah, dan kerja sama antar desa; b) Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa; c) Urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Trisantono (2011:8) menyebutkan, guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan perancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewailinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa. Adanya partisipasi perangkat dan masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur utama yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penyelenggaraan tersebut. Peran Kepala Desa Wonoasri dalam meningkatkan partisipasi terhadap perangkat dan masyarakat sudah maksimal, hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa perangkat dan masyarakat mampu memberikan partisipasi baik sumbangan pikiran, materi dan uang maupun tenaga terhadap desa. Bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan yang ditunjukkan melalui partisipasi secara penuh. Komunikasi antara aparat dan masyarakat sudah terjalin dengan baik sehingga timbul dorongan untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Proses mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun kelompok untuk bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan, dibagi menjadi beberapa tipe yaitu:
 - a) Tipe Otoriter, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya. Cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Disini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari

- bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendali penuh ada pada pemimpin (bersifat satu arah).
- b) Tipe Demokratis, disini pemimpin ikut berbaur dan berada ditengah-tengah anggotanya. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan kesanggupan organisasi dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya.
 - c) Tipe Liberal, disini pemimpin lebih melimpahkan segala wewenang terhadap bawahannya dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
3. Gaya kepemimpinan Kepala Desa Wonoasri merupakan gaya yang demokratis hal ini dibuktikan karena di dalam memberikan pengarahan, berkoordinasi dan komunikasi, pengambilan keputusan serta pengawasan selalu melibatkan masyarakat desa di dalam proses tersebut dan mau menerima saran kritik yang diberikan oleh masyarakat Desa Wonoasri.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut, maka peneliti mencoba menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada kepala desa pada jabatan struktural maupun pada jabatan fungsional tetap lebih partisipatif dalam hal pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Sebagaimana pemerintahan desa yang memiliki banyak unit tugas, maka perpustakaan dalam melakukan koordinasinya lebih memperhatikan perihal komunikasi agar kesimpangsiuran informasi yang diterima oleh para perangkat dan bawahan tidak ada hambatan dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa tersebut.
2. Bagi Perangkat Desa Wonoasri
Bagi perangkat Desa Wonoasri diharapkan mampu untuk bekerja sama dengan kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang ada di wilayah serta berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Terutama dengan gaya kepemimpinan kepala desa yang

demokratik diharapkan akan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa yang akan dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2011. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agushoa, Kaswata. 1985. *Pembangunan Desa*. Jakarta: PT. Binakarsa.
- Akbar, Usman. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andang. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Melayu, S.P. Hasibun. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cetakan 9 PT. Bumi Aksara.
- Haryono. 2006. *Model Pembelajaran Berbasis Peningkatan Keterampilan Proses Sains*. Jurnal Pendidikan Dasar.
- Hatta, Mohammad. 1970. *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard. 2000. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Mangkunegara, Prabu Anwar A. A. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Margono Slamet. 1999. *Pembelajaran Bermutu, Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Head Project-Depdikbud.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Pratiwi, Agustin. 2013. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono. 1994. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rivai, Veitzhal dan Muyadi, Deddy. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soelaiman. 2009. *Manajemen Kinerja; Langkah Efektif untuk Membangun, Mengendalikan dan evaluasi Kerja, Cetakan kedua*. Jakarta: PT. Inetrmedia Personalia Utama.
- Soemardjan, Selo. 1992. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Stoner, James A.F., Freeman, R. Edward & Gilbert JR., Daniel R. 1996. *Manajemen (Alih Bahasa Alexander Sindoro)*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sugiyono, dan R&D. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Surbakti Ramlan. 2008. *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Jakarta Press.
- Suryaningrat, Bayu. 1976. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Bandung: PT. Mekar Jaya.
- Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutikno, Sobry. M. 2014. *Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan, Edisi Pertama*. Lombok: Holistica.
- Tannenbaum, R. Weschler, I. dan Massarik, F. 2013. *Leadership and Organization*. Los Angeles: Routledge.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. P. 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Erlangga (Terjemahan).
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Veithzal, Rivai. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wahjosumidjo. 1994. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Grafindo.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yukl, Gary. 2005. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks.

Rujukan Online

- Eman. 2001. Gaya kepemimpinan.
<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=8&submit.y=9&submit=prev&page=2&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feman%2F2001%2Fjiunkpe-ns-s1-2001-31497006-694-produktivitaschapter2.Pdf> [18 Juni 2018]
- Agnesia, P. 2015. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masih Hadapi Sejumlah Kendala.

<http://www.zonalima.com/artikel/4130/PenyelenggaraanPemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-Sejumlah-Kendala/> [23 Juli 2018].

Haryadi, Ahmad. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah. <https://media.neliti.com/media/publications/149842-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-musyawah.pdf> [1 Juni 2018]

Situmorang, B. 2016. Desa Swakarya, Desa Swadaya dan Desa Swasembada. <http://www.kamusbesar.com/49943/desa-swadaya-swakarya-swasembada> [23 April 2018]

Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA I
KEPALA DESA WONOASRI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

1. Apa yang menjadi landasan/regulasi dalam menjalankan Pemerintah Desa Wonoasri?
2. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan tentang kepemimpinan? Dan kepemimpinan seperti apa yang Bapak pakai untuk meningkatkan partisipasi perangkat maupun masyarakat?
3. Jika ada kegiatan penyuluhan dari pemerintahan apa masyarakat selalu diundang untuk hadir?
4. Bagaimana usulan/pendapat yang diperoleh dalam musyawarah? Apakah usulan/pendapat benar-benar diperoleh dari seluruh peserta musyawarah atau hanya usulan dari BPD/Pemerintah Desa yang mendominasi?
5. Perangkat maupun masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya, apakah benar-benar merupakan keinginan mereka atau hanya untuk memenuhi aturan?

PEDOMAN WAWANCARA II
PERANGKAT DESA WONOASRI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana wewenang Kepala Desa Wonoasri dalam melaksanakan pemerintahan?
2. Apakah Kepala Desa Wonoasri mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinan?
3. Bagaimana analisis dan uraikan pekerjaan dari kepala desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Wonoasri?
4. Bagaimana sifat atau pribadi dari Kepala Desa Wonoasri terkait jiwa kepemimpinan?
5. Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap setiap keputusan yang telah dibuat dan untuk setiap keperluan yang dibutuhkan?
6. Bagaimana partisipasi peserta musyawarah dalam memberikan ide atau usulan pada Musdes/Musrembangdes dalam forum maupun mengevaluasi?
7. Bagaimana mengenai hasil putusan di dalam musyawarah di forum Musdes/Musrembangdes, yang dijadikan pembasahan tujuan bersama?
8. Perangkat maupun masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya, apakah benar-benar merupakan keinginan mereka atau hanya untuk memenuhi aturan?
9. Bagaimana keterlibatan perangkat dalam memonitoring dan mengevaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

PEDOMAN WAWANCARA III
MASYARAKAT DESA WONOASRI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana wewenang Kepala Desa Wonoasri dalam melaksanakan pemerintahan?
2. Apakah Kepala Desa Wonoasri mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinan?
3. Bagaimana analisis dan uraikan pekerjaan dari kepala desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Wonoasri?
4. Bagaimana sifat atau pribadi dari Kepala Desa Wonoasri terkait jiwa kepemimpinan?
5. Apakah pemerintah desa sudah bekerja dengan baik sesuai tugasnya dalam membantu Kepala Desa?
6. Bagaimana keterlibatan peran masing-masing peserta musyawarah dalam memberikan usulan/pendapat?
7. Bagaimana BPD/Pemerintah Desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam persiapan dan pembahasan pada Musdes/Musrembangdes?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Wonoasri dalam mengawasi program Desa Wonoasri?
9. Apakah semua Masyarakat terlibat dalam pengawasan program atau hanya sebagai masyarakat saja?

II. Dokumentasi



Digital Repository Universitas Jember



III. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1688/UN25.3.1/LT/2018 15 Mei 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1830/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Zulfa Mazidah
NIM : 140910201030
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Imam Sukari No.110 Mangli-Jember
Judul Penelitian : "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo"
Lokasi Penelitian : 1. Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kab. Jember
2. Kantor Kecamatan Tempurejo Kab. Jember
Lama Penelitian : 2 Bulan (20 Mei-30 Juli 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala Desa Wonoasri Kec. Tempurejo Kab. Jember;
2. Camat Tempurejo Kab. Jember; ✓
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs;
5. Arsip.

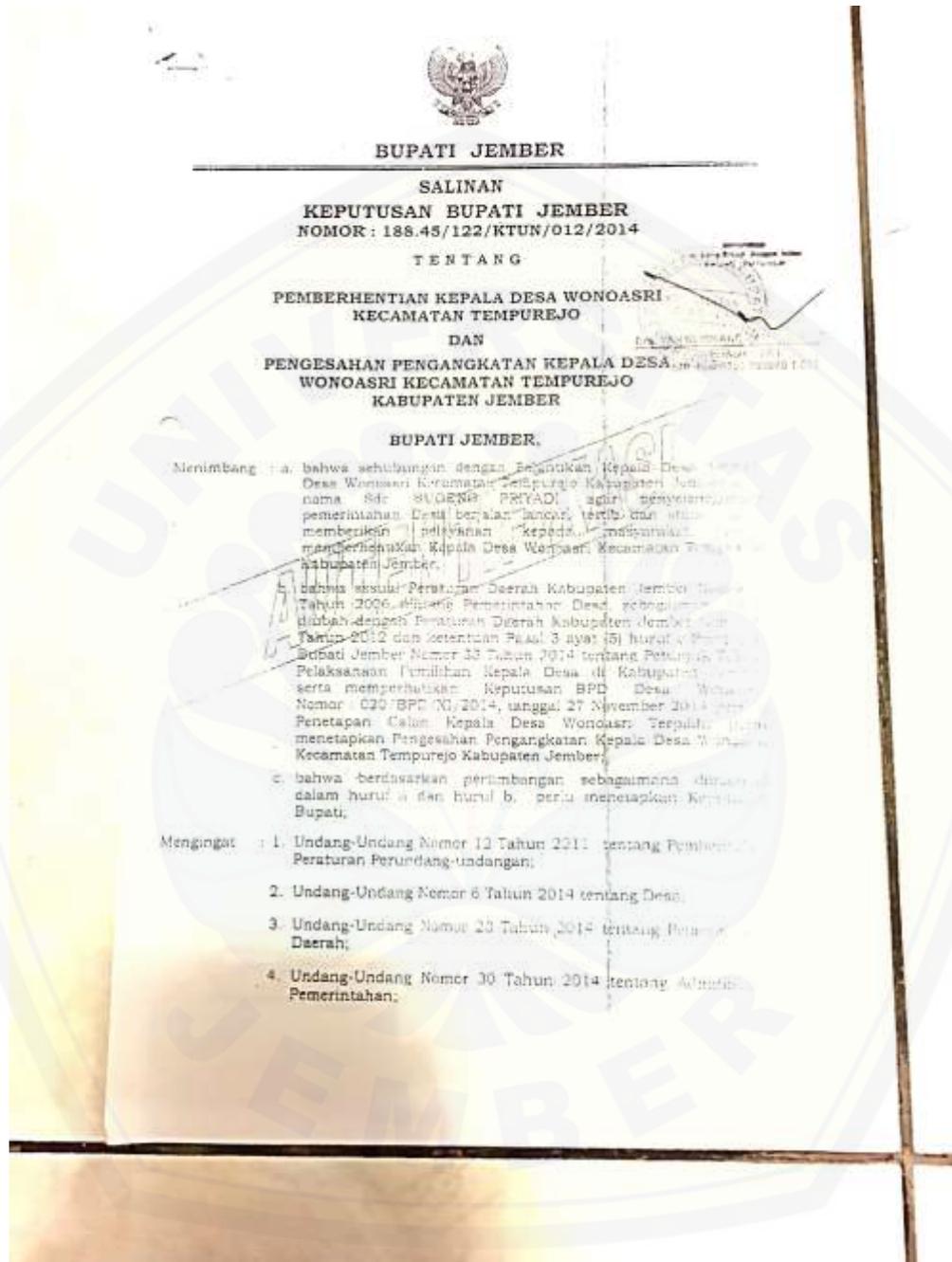


CERTIFICATE NO : QMS/173

IV. Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember
Kepada Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kab. Jember di - J E M B E R	
SURAT REKOMENDASI Nomor : 072/1401/415/2018	
Tentang PENELITIAN	
Dasar :	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan :	Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 1688/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
MEREKOMENDASIKAN	
Nama / NIM. :	Zulfa Mazidah / 140910201030
Instansi :	FISIP Universitas Jember
Alamat :	Jl. Imam Sukari 110 Mangli, Jember
Keperluan :	Melaksanakan Penelitian dengan judul : "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo"
Lokasi :	Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri
Waktu Kegiatan :	Mei s/d Juli 2018
Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud	
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan	
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik	
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.	
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
Ditetapkan di : Jember Tanggal : 18-05-2018 An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER Kabid. Kajian Strategis dan Politik  ACHMAD DAVIN S. Sos NIP. 19690912199602 1 001	
Tembusan :	
Yth. Sdr. :	1. Ketua LPPM Universitas Jember; 2. Yang Bersangkutan.

V. SK Kepala Desa



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN
KECAMATAN
TEMPUREJO

KEDUA Mengesahkan Pengangkatan Bdr. SUGENG PRYADI sebagai Kepala Desa Wungken Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

STIGA Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEPUTUSAN ini, wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 8 - 12 - 2014 NOMOR 122

Jember, di Jember
pada tanggal 8 Desember 2014

BUPATI JEMBER,

td

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN



VI. Piagam Penghargaan



VII. SK Penghargaan



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Watu Telp. / Fax (031) 8550222 (031) 8550101
SIDOWALU - 61256

Sidoarjo, 8 Oktober 2018

Nomor : 360/1409/208.02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Pemenang
Lomba Desa/Kelurahan
Tanggah Bencana Jawa
Timur Tahun 2018

Kepada Yth. *
Sdr. Bupati / Walikota
* Sesuai Daftar Terlampir *

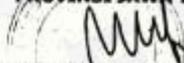
Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/532/KPTS/013/2018 Tentang Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018, kami menyampaikan ucapan **"Terima Kasih dan Penghargaan"** yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Lomba tersebut diatas, selanjutnya kami juga menyampaikan **"Ucapan Selamat dan Sukses"** atas Prestasi Pemenang Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka penerimaan hadiah berupa uang dimohon dengan hormat untuk mengirimkan data yaitu :

1. Fotocopy Rekening Koran Bank atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan Pemenang lomba ;
2. Fotocopy NPWP atas nama Pemerintah Desa Kelurahan Pemenang lomba ;
3. Surat Pengantar dari BPBD Kabupaten/Kota.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


SUBAN WAHYUDIONO, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19600825 198003 1 001

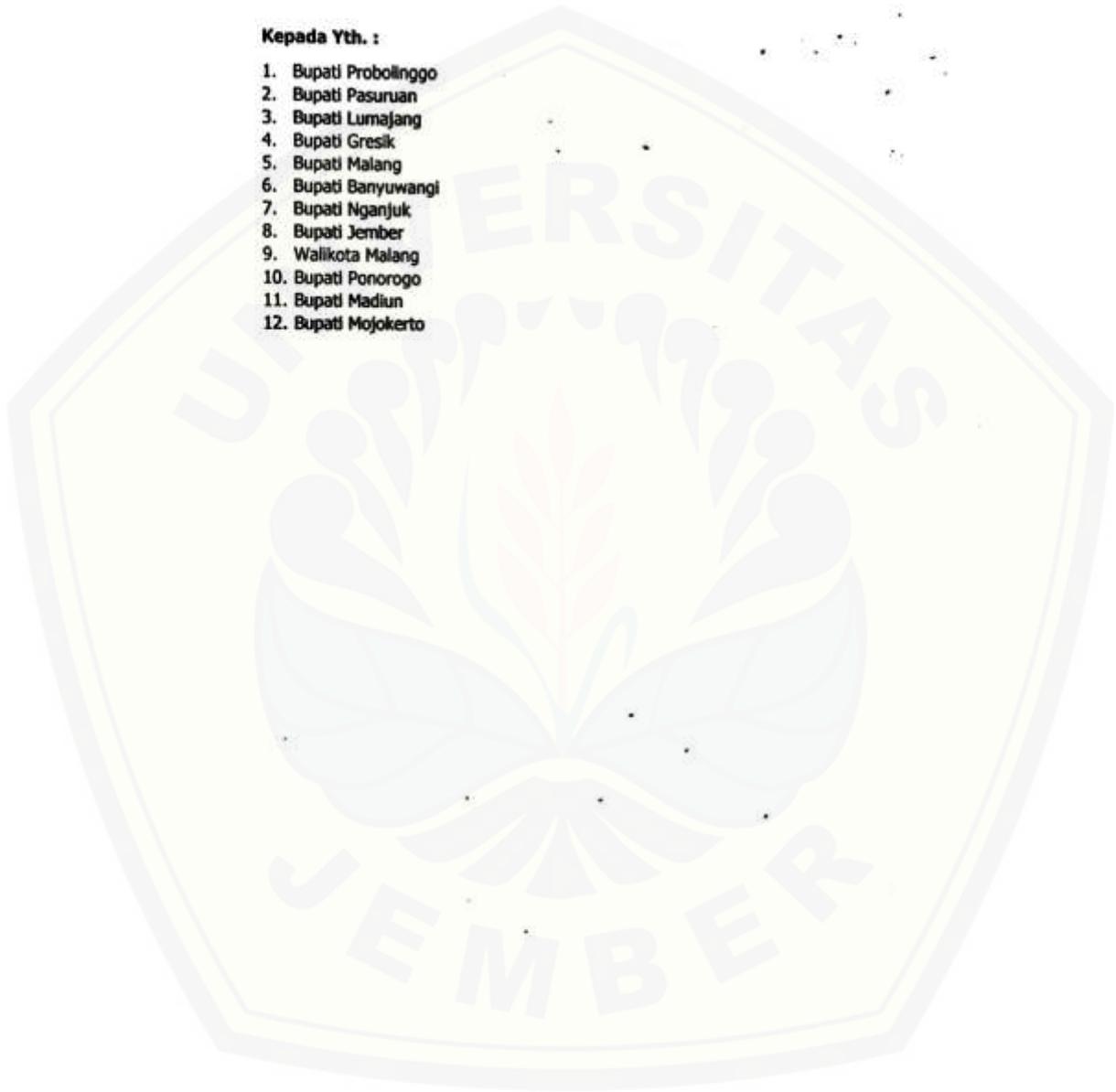
Lampiran Surat BPBD Provinsi Jawa Timur

Nomor : 360/1469 /208.2/2018

Tanggal : 8 Oktober 2018

Kepada Yth. :

1. Bupati Probolinggo
2. Bupati Pasuruan
3. Bupati Lumajang
4. Bupati Gresik
5. Bupati Malang
6. Bupati Banyuwangi
7. Bupati Nganjuk
8. Bupati Jember
9. Walikota Malang
10. Bupati Ponorogo
11. Bupati Madiun
12. Bupati Mojokerto





GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA
NUMBER 188/532/KPTS/013/2018

REGARDING

WINNERS OF VILLAGE / SUBURBAN DISASTER RELIEF CONTEST
PROVINCIAL EAST JAVA 2018

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang : bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/290/KPTS/013/2018, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2018;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2018;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/290/KPTS/013/2018 tentang Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Kategori Utama :

- 1) Bidang Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas :
Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo
- 2) Bidang Inovasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :
Desa Kedaungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan
- 3) Bidang Administrasi dan Legislasi :
Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang
- 4) Bidang Kemandirian Pendanaan :
Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

b. Kategori

b. Kategori Madya :

- 1) Bidang Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas :
Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
- 2) Bidang Inovasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :
Desa Grajagan, Kecamatan Purworhajo, Kabupaten Banyuwangi
- 3) Bidang Administrasi dan Legislasi :
Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk
- 4) Bidang Kemandirian Pendanaan :
Desa Wonosari, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

c. Kategori Pratama :

- 1) Bidang Partisipasi dan Pengembangan Kapasitas :
Kelurahan Bandung Rejosasi, Kecamatan Sukun, Kota Malang
- 2) Bidang Inovasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :
Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo
- 3) Bidang Administrasi dan Legislasi :
Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madlun
- 4) Bidang Kemandirian Pendanaan :
Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan, masing-masing sebagai berikut :

- a. Kategori Utama, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Kategori Madya, sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kategori Pratama, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

KETIGA : Membebaskan biaya hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (17) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Kegiatan (003) Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Daerah, Kode Rekening 5.2.2.23.01 dan 5.2.2.23.02.

KEEMPAT:

4 of 4

KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (17) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Kegiatan (003) Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Daerah, Kode Rekening 5.2.2.23.01 dan 5.2.2.23.02.

KEEMPAT:

Scanned by CamScanner

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2018



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pemenang dimaksud.

Scanned by CamScanner

VIII. Berita Acara Rapat Rutin Desa

No.
Date:

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin - 16 Juli 2018
 Tempat : Ruang Rapat
 Acara : Rapat Rutin

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	SUGENG PRIYADI	Kepala Desa	1
2	SUHARYONO, SH	Sekretaris Desa	
3	BOINI SANTOSO	K. Perencanaan	3
4	LILIK SUMARTIN	K. UMUM	4
5	ALMAARIF	K. Kesejahteraan	5
6	SUXITNO	K. Pemerintahan	6
7	SISWANTO	K. Pelayanan	7
8	ILUTH	Staf	
9	LUVITA	Staf Bendahara	9
10	SUKOWONO	Ketua RW 001	10
11	HARIYONO	" 004	11
12	BAMBANG A.S	" 002	12
13	SAMIONO	Kasun Franton	13
14	M. TOHA	" CRLELE.	14

- Rapat dipimpin DD tahap 2 sudah selesai (finishing)
 - Pemasangan Patok 4 RW KOT belum terpasang di sekitar Jalan Raya.
 - 4/ Penyempurnaan Rumpuk diserahkan kepada P. MIN (RT 008).
 - 4/ Pendistribusian KK-KTP- akte tgl. 19 Juli 2018 di Balai Desa (koti panti).
 - 4/ RW.02 menyampaikan masalah Kartu tani untuk para warga
 MEND. NOL karena pp nya baru (belum ada yang punya).
 dan penyalangannya bantuan irigasi mesin sudah mencapai 60%.
 - 4/ Kati perencana mengajukan juga memberi lahan kepada semua RW.
 Kaitan dengan HUT RI. juga masalah Kartu tani.

MIRA32

IX. RPJM Desa Wonoasri





Revisi 8/18/20

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan petunjuk serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2021. Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan desa Wonoasri lima tahun kedepan. RPJM - Desa memberikan gambaran konkrit tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 tahun).

Di samping sebagai arahan bagi pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan di desa. Masyarakat dapat memanfaatkan Dokumen RPJMDes tersebut untuk mengetahui program desa dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Untuk itu partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan sangat penting, dan itu merupakan amanat Undang-undang. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan yang di tandai dengan tingginya rasa turut memiliki dan tanggung jawab.

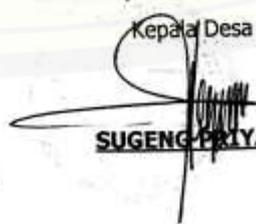
Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua lapisan masyarakat desa Wonoasri yang telah membantu Tim Perumus RPJM Desa, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Semoga amal yang telah diberikan mendapat balasan adari Allah SWT , amin.

Akhirnya semoga dokumen ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya warga desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ,untuk bisa digunakan sebagai sarana kontrol dan evaluasi agar bisa mencapai tahapan pembangunan yang lebih baik, guna menuju masyarakat yang damai dan sejahtera.

Wonoasri,

2016

Kepala Desa


SUGENG PRIYADI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Peraturan Desa Wonoasri No 2 Tahun 2016 tentang RPJM Desa	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Pengertian	3
1.4. Maksud dan Tujuan	5
BAB II PROFIL DESA WONOASRI	
2.1. Kondisi Desa	7
2.1.1 Sejarah Desa	7
2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Wonoasri	8
2.1.3 Sejarah Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Wonoasri	9
2.1.4 Demografi	11
2.1.5 Pendidikan	13
2.1.6 Kesehatan	14
2.1.7 Kondisi Sosial	15
2.1.8 Kondisi Ekonomi	16
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	17
2.2.1 Pembagian Wilayah	17
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	18
BAB III POTENSI DAN MASALAH	
3.1. Potensi Desa	22
3.2. Masalah	22

BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1.	Visi dan Misi.....	28
4.1.1	Visi	28
4.1.2	Misi	29
4.2	Kebijakan Pembangunan	30
4.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	30
4.2.2	Program Pembangunan Desa.....	32
4.2.3	Strategis Pencapaian	33
BAB V	PENUTUP.....	35

LAMPIRAN – LAMPIRAN
TABEL RENCANA PEMBANGUNAN DESA
SK TIM PERUMUS RPJM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa setiap tingkatan pemerintahan wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Ini berarti desa yang merupakan pemerintahan terbawah juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) setiap tahunnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri dalam kurun waktu 6 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wonoasri tahun 2016 - 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Desa Wonoasri yang harus dicapai melalui Rencana Kerja Desa Wonoasri tahunan.

Disamping itu keberadaan RPJMD dapat digunakan sebagai gambaran konkrit tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 tahun). Sehingga dapat dijadikan arahan bagi desa untuk menentukan prioritas terpenting dari pembangunannya sehingga proses pembangunan di desa tepat sasaran dan tidak salah perencanaan dan selalu berkesinambungan. Selain itu dokumen RPJMD dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat dapat tumbuh dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh aparat desa sedini mungkin dapat terdeteksi dan terselesaikan.

Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021 merupakan perencanaan strategis desa, maka

dibuatkanlah peraturan desa Wonoasri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Wonoasri Tahun 2016-2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. PP No. 60 tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomanan Pembangunan Desa;
10. SE Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP daerah dan RPJM Daerah
11. Permendagri No 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Perdes
12. Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Permendagri No. 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
14. Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 – 2015 (lembaran daerah Kabupaten Jember tahun 2012 Nomor 8)
21. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten Jember 2 Tahun 2005 – 2015 (lembaran daerah kabupaten Jember tahun 2015 nomor 2)
22. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 tentang Desa
23. Peraturan Bupati jember Nomor 22 tahun 2015 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Jember tahun 2016 (berita daerah kabupaten jember tahun 2015 nomor 22)

1.3 Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangk prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2016 - 2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wonoasri diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan

permasalahan permasalahan pembangunan spesifik Desa Wonoasri sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang .
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan

BAB II

PROFIL DESA WONOASRI

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Pengetahuan Sejarah sangat penting guna menggali terbentuknya Sebuah Negara, atau sebuah Desa khususnya tentang sejarah berdirinya Desa wonoasri. Desa wonoasri sebelumnya hanyalah sebuah padukuan /Kampung bernama Dusun Kraton. Sebelum menjadi sebuah padukuan Kraton, Desa Wonoasri adalah sebuah hutan belantara yang konon dahulu kala orang menyebut Hutan Kraton, karena dimasa kejayaan kerajaan ditanah Jawa Hutan Kraton adalah bekas Kraton Kedaton Dari Ratu Kebo mas RA Condrowati dan Raden Aryo Blater dengan sebutan lain Raden Aryo Cenkiling dan Raden Suto Wijoyo.

Terbukti Ada petilasan makam para raja tersebut yaitu :

1. RA. Ratu Kebomas Makam di RW04 RT04 Kraton Wonoasri Sekarang
2. RA. Condrowati Makam di RW 03 Kraton Wonoasri Sekarang
3. Raden Sutowijoyo Makam di RW 02 Rt 01 Kraton Wonoasri Sekarang
4. Raden Aryo Cengkiling/Raden Aryo Blater diwiyah kampung Aryo

Sejarah yang melegenda pada masyarakat Kraton Kedaton Kasepuhan ada diwilayah makam RAA. Kebomas / dengan sebutan Mbah Ratu, Kraton Kasunanan ada diwilayah makam Raden Aryo Cengkiling, Kampung Aryo sekarang.

Sebelum Menjadi sebuah Dusun/Padukuan Kraton Hutan Kraton Kedaton juga adalah sebuah hutan Belantara yang terkenal dengan Hutan Angker dalam bahasa Jawa "JALMO MORO JALMO MATI" URIK ORA BISO MBALEK artinya bila orang datang dengan niat jahat dengan adanya hutan ini maka akan meninggal, dan jika memetik buah-buahan dihutan ini bila dibawa pulang maka akan kebingungan di area hutan dan gak bisa pulang. Dan dari makam petilasan para raja diatas sampai

sekarang tetap dilestarikan keberadaanya. Hutan Kraton Kedaton asal muasal dibuat padukuan/dusun oleh beberapa tokoh dari wilayah mentaraman yaitu Raden COKRO dan Raden Abdurahman Umar dari keturunan para raja mataram pada taun 1942 bersamaan penjajahan jepang masuk kenegara kita ini. Sebelum kemerdekaan negara republik Indonesia, dibutuhkan waktu 11 tahun dalam pembuatan padukuan kraton karena sampai tahun 1954 kayu dari tebangan hutan kraton kedaton dibawa ke PTP Kotta Blater sebagai bahan bakar lokomotif/kereta api sebagai alat angkut hasil perkebunan Kotta Blater kala itu.

Kami menyadari dengan berdirinya Sejarah Desa Wonoasri yang ditulis dan dibukukan ini belum memenuhi beberapa unsur semua pihak, untuk itu menjadi tugas kita terus menggali dan terus mengkaji guna memperbaikinya.

2.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa Wonoasri

Desa Wonoasri sebelumnya hanya sebuah dusun, Padukuan/Kampung bernama Dusun Kraton bagian dari Desa Sanenrejo yang berdiri 4 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Mandilis, Dusun Curah lele dan Dusun Kraton. Dusun Kraton ini terletak paling ujung barat dari Desa sanenrejo yang dipisahkan oleh perkebunan Kalisanen

Sedangkan Desa Sanenrejo merupakan pecahan dari Desa Curahnongko dari tahun 1948. Kepala Desa Curahnongko Bapak Japar sedang Kepala desa Sanenrejo Ahmad Rosid.

Pada tanggal 1950 Rahmad sasmito Dipilih sebagai Petinggi Desa Sanenrejo dengan Keputusan Residen Besuki Nomer 26 Tanggal 28 April 1950 Dusun/Padukuan Kraton resmi jadi padukuan/dusun bagian dari Desa Sanenrejo, padukuan Kraton dipimpin oleh Kepala Kampung Bapak Tego, dan kemudian digantikan Bapak Basiran dilanjutkan oleh Bapak Kasian.

Pada tanggal 6 November 1987 nomer :144/02/544.04/1987

Tentang pengusulan Dukuh Kraton Dan Dukuh Curahlele untuk menjadi Desa persiapan Yaitu Desa Wonoasri dengan PJ Kepala Desa Bapak Kasian.

Selanjutnya pada tanggal 21 November 1990 Rahmad Sasmito berhenti dengan hormat dengan SK Bupati TK II Jember tanggal 21 November 1990 nomer 48 tahun 1990, dan diangkat pula Kepala Desa Terpilih yaitu Marsudi .

Baru setelah adanya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 19 Mei 1994 nomer 68 Tahun 1994 Tentang Desa Persiapan Desa Wonoasri menjadi Desa Difinitif Dan pemilihan kepala Desa Wonoasri diadakan yang pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Desa Wonoasri dengan kepala Desa terpilih Budi Santoso.

Sedang jumlah dusun / dukuan di desa Wonoasri ada 2 dusun yaitu ;

- o Dusun Kraton
- o Dusun Curahlele

Dari masa adanya desa Wonoasri sampai sekarang telah mengalami pergantian beberapa kali Kepala Desa, yaitu :

- ⇒ Pj Kepala Desa Kasian yang memerintah antara tahun; 1987 – 1994
- ⇒ Kepala Desa Budi Santoso yang memerintah antara tahun; 1994 – 2007
- ⇒ Pj Kepala Desa Kateno yang memerintah antara tahun; 2007 - 2008
- ⇒ Kepala desa Budi Santoso yang memerintah antara tahun; 2008 – 2012
- ⇒ Pj Kepala Desa Abdul Rahman memerintah antara tahun; 2013 - 2014
- ⇒ Kepala Desa Sugeng Priyadi yang memerintah antara tahun; 2014 - Sampai sekarang.

2.1.3. Sejarah pemerintahan dan pembangunan desa Wonoasri

Perkembangan desa hari demi hari, tahun berganti tahun pembangunan desa pasti ada perubahan dan ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada priodenya, diantaranya ;

- ⇒ Masa kepemimpinan Pj Kepala Desa Kasian (1987 – 1994)
 - Pembangunan Balai Desa Wonoasri
- ⇒ Masa kepemimpinan Kepala Desa Budi Santoso (1994 - 2007)
 - Rehab Kantor Pemerintah Desa
 - Peninggian jalan RW 004 gang 1-2
 - Pembangunan masjid
 - Pembangunan musolla
- ⇒ Masa kepemimpinan kepala Desa Budi Santoso yang memerintah antara tahun (2008 – 2012)
 - Perbaikan jalan desa
 - Perbaikan jalan lingkungan
 - Perehapan masjid
 - Perehapan Kantor Desa
 - Pembangunan Saluran Air
 - Pembangunan TK
- ⇒ Masa kepemimpinan Pj Kepala Desa Abdulrahman yang memerintah antara tahun (2013-2014)
 - Rehab Musola Desa wonoasri
 - Rehab Kantor Balai Desa
 - Perbaikan Saluran air gang 5-6
 - Perbaikan Saluran air Ds Kraton gang 1
- ⇒ Masa kepemimpinan Kepala Desa Sugeng Priyadi yang memerintah antara tahun (2014 - Sekarang)

2.1.4 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa Wonoasri adalah 10.957 jiwa, dengan rincian 5.522 laki-laki dan 5.435 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5	229	243	472	4.31 %
2	6 – 10	337	321	658	6.01 %
3	11 – 15	339	338	677	6.18 %
4	16 – 20	325	334	659	6.01 %
5	21 – 25	501	507	1008	9.20 %
6	26 – 30	556	464	1020	9.31 %
7	31 – 35	443	447	890	8.12 %
8	36 – 40	429	471	900	8.21 %
9	41 – 45	457	449	906	8.27 %
10	46 – 50	324	333	657	6.00 %
11	51 – 55	321	329	650	5.93 %
12	56 – 60	279	291	570	5.20 %
13	61 – 65	267	275	542	4.95 %
14	66 – 70	224	263	487	4.44 %
15	71 – 75	221	232	453	4.13 %
16	75 ke atas	197	211	408	3.72 %
Jumlah Total		5449	5508	10.957	100 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Wonoasri sekitar 5381 atau hampir 49,11 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 3245 KK di atas, sejumlah 648 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 1134 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 912 KK tercatat

Keluarga Sejahtera II; 551 KK tercatat Keluarga Sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka terdapat 1782 KK atau lebih 55 % KK Desa Wonoasri adalah keluarga miskin.

Letak Geografis desa Wonoasri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Jarak dari Ibukota Kecamatan \pm 8 km ke arah Utara, sedang dari ibukota kabupaten \pm 30 km ke arah Utara. Luas wilayah Desa Wonoasri adalah 624,547 Ha, yang merupakan daerah pertanian yang subur sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Disamping untuk lahan pertanian tanah tersebut digunakan untuk pemukiman, kantor desa, gedung sekolah, tempat ibadah, makam dll.

Batas administratif desa Wonoasri adalah ;

- Sebelah Utara ; Desa Sidodadi
- Sebelah Selatan; Desa Curahnongko
- Sebelah Barat; Desa Curahnongko
- Sebelah Timur; Desa Curahnongko

Pola pembangunan lahan di desa Wonoasri lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, seperti padi, jagung, polowijo.

Aktifitas mobilisasi di Desa Wonoasri cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya, karena kondisi jalan yang telah beraspal. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa Pustu Desa yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena kurang ditunjangnya infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Wonoasri tidak

bisa mengangkat derajat hidup petani karena kebanyakan masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai perantau di luar daerah dan luar negeri bukan petani.

2.1.5 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan dan kehidupan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Wonoasri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Tamat Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	589	5.38 %
2	Tidak tamat SD	2373	21.66 %
3	Tamat SD	2589	23.63 %
4	Tamat SLTP	2724	24.86 %
5	Tamat SLTA	2254	20.57 %
6	Diploma	329	3.00 %
7	Sarjana	94	0.86 %
8	Pasca Sarjana	5	0.05 %
Jumlah Total		10,957	100 %

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Wonoasri hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA keatas yang hanya 24.48 % ,sedangkan dibawah SMA 75,52 %. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Tingkat pendidikan di Desa Wonoasri, tidak terlepas dari sarana

dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat desa Wonoasri sudah meningkat, terbukti dengan adanya. Sarana pendidikan di Desa Wonoasri tersedia Sekolah Dasar Negeri (SDN/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Wonoasri yaitu melalui pelatihan dan kursus, namun kami punya harapan agar dinas dan instansi terkait berkenan memberikan pelatihan demi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

2.1.6 Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain diabet, darah tinggi, demam berdarah, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Wonoasri secara umum.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mulai tumbuh dan disadari, dari jumlah 101 balita di tahun 2012, tidak ada balita bergizi buruk, bergizi kurang dan lainnya semuanya dalam keadaan baik. Hal inilah kiranya yang perlu dipertahankan agar kualitas balita Desa Wonoasri ke depan lebih baik.

2.1.7 Kondisi Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Wonoasri, masyarakat selalu mengikuti, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilihan Legislatif, Pilpres, Pemilukada, dan Pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma - norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan Juli 2010 masyarakat juga di libatkan pada pemilihan Bupati dan Pada bulan Juli 2012 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan pada bulan April 2014 masyarakat juga di libatkan pada pemilihan legislatif dan pada bulan Juli 2014 masyarakat juga dilibatkan secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan di akhir tahun 2014 tepatnya bulan Nopember 2014 Desa Wonoasri melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Wonoasri Periode 2014-2020. Walaupun tingkat partisipasinya tidak 100%, namun hampir 80 % daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Wonoasri.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa mengedepankan pola kepemimpinan

yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Wonoasri mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Wonoasri kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

2.1.8 Kondisi Ekonomi

Umumnya penduduk pedesaan mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relatif rendah sehingga akses mereka memasuki pasar tenaga kerja juga rendah. Akibatnya mereka tetap terpuruk pada sektor pekerjaan informal dan industri skala kecil yang kebanyakan memberikan penghasilan yang rendah.

Tidak jauh beda dengan keberadaan tenaga kerja di desa Wonoasri. Mereka banyak yang bekerja sebagai buruh kasar di sektor pertanian, jasa/perdagangan dan lain-lain. Secara umum Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Wonoasri Rp. 1000.000,-/bulan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 6
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	1.823 orang	18.55 %
2	Buruh tani	2.645 orang	26.91 %
3	PNS/TNI/POLRI	14 orang	0.14 %
4	Karyawan swasta	673 orang	6.85 %
5	Pedagang	479 orang	4.87 %
6	Karyawan PTPN	1.865 orang	18.98 %
7	Jasa	172 orang	1.75 %
8	Lain-lain	2.157 orang	21.95 %
	Jumlah	9.828 orang	100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Wonoasri masih cukup banyak, berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 257 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.237 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Wonoasri

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Desa ditengah era otonomi dewasa ini, semakin ditantang untuk mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik agar pemerintahan desa mampu dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dengan otonomi maka penyelenggaraan pemerintah yang baik bisa ditegakkan karena pemerintah desa mempunyai kewenangan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

2.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Wilayah Desa Wonoasri terdiri dari 2 Dusun yaitu : Kraton dan Curahlele yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan

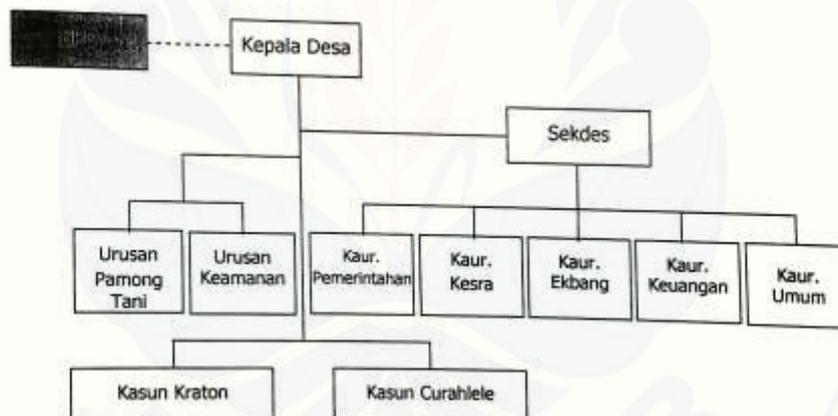
tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wonoasri.

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wonoasri memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Wonoasri tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan I
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Wonoasri



Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	SUGENG PRIYADI	Kepala Desa
2	ABDUL RAHMAN	Sekretaris Desa
3	ZEIN LUTFIARI DAMARA	Staf Sekretariat Desa
4	BOINI SANTOSA	Kepala Urusan Pemerintahan
5	SUYITNO	Kepala Urusan Ekbang
6	LILIK SUMARTIN	Kepala Urusan Umum
7	AL-MA'ARIF	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
8	TIRTO SANTOSO	Kepala Urusan Keuangan
9	SISWANTO	Kepala Urusan Keamanan
10	SUHARYONO	Kepala Urusan Pamong Tani
11	SAMIONO	Kepala Dusun Kraton
12	MOHAMMAD TOHA	Kepala Dusun Curahlele

Tabel 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	TUSBANI	Ketua
2	WAGIMAN	Wakil Ketua
3	KHOINUR AFAN	Sekretaris
4	MARSAID	Anggota
5	IWAN RONI	Anggota
6	WIDI SUTRISNO	Anggota
7	AGUS KHUMAIDI	Anggota
8	SUPANOTO	Anggota
9	KUSMANAP	Anggota
10	NAWAWI	Anggota
11	MARSUDI	Anggota

Tabel 3
Nama-nama LPMD Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	BAMBANG ADI SANTOSO	Ketua
2	EDI MULYONO	Wakil Ketua
3	FARID SAHRONI	Sekretaris
4	FATKHUR ROHMAN	Bendahara
5	EKDAR SUJATI	Anggota
6	MISDI EFENDI	Anggota
7	SUPRIYANTO	Anggota
8	EDWIN JUJUK PRAMONO	Anggota
9	NANANG SETIAWAN	Anggota
10	MISNO	Anggota
11	DADANG PRIO UTOMO	Anggota
12	ABU SALIM	Anggota

Tabel 4
Pengurus Karang Taruna Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	MOCH. AMINULLAH	Ketua
2	ZAENAL ARIFIN	Wakil Ketua
3	DEDIK KUSWOYO	Sekretaris I
4	AHMAD HAKIKI	Sekretaris II
5	EKA DWI LESTARI	Bendahara
6	NIKMA MAULIDA	Anggota
7	ANDI KRISWANTO	Anggota
8	GINTING	Anggota
9	YUDI IRAWAN	Anggota
10	ARIS RENANDIKA	Anggota

Tabel 5
Tim Penggerak PKK Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	Ny. SUGENG PRIYADI	Ketua
2	Ny. ABDUL RAHMAN	Wakil Ketua
3	RATNA PUJANINGTYAS	Sekretaris I
4	SUPMINI WARDANI	Sekretaris II
5	ASMINAH	Koordinator Pokja I
6	ANI SRIANI	Koordinator Pokja II
7	ENDANG WIJASTUTIK	Koordinator Pokja III
8	SRI WINARNI	Koordinator Pokja IV

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Wonoasri kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi Desa

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan satu desa. Potensi desa mencakup keadaan alam dan manusia yang ada didalamnya beserta hasil kerja manusianya. Potensi desa terdiri atas komponen alam dan komponen manusia. Desa Wonoasri memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Wonoasri yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Tabel Rincian Potensi dan Masalah

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1.	Batas Desa	- Tenaga Masyarakat - Swadaya Masyarakat	Masih Kurang Jelasnya Batas Wilayah Desa
2.	Data Desa	- Partisipasi Masyarakat - SDM Perangkat	Masih kurangnya data penunjang di Desa
3.	Tata Ruang Desa	- Partisipasi Masyarakat - SDM Perangkat	Tata ruang desa masih kurang baik

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
4.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Perangkat Lengkap - Swadaya Masyarakat	Banyaknya masalah yang ada di Desa
5.	Pengelolaan Informasi Desa	- SDM Perangkat Desa - Swadaya Masyarakat	Pengelolaan Informasi desa belum maksimal
6.	Perencanaan Desa	- Perangkat Lengkap - SDM Perangkat	Kurang maksimalnya program desa
7.	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	- Perangkat Lengkap - SDM Perangkat - Partisipasi Masyarakat	Kurang maksimalnya hasil pembangunan desa
8.	Kerjasama Antar Desa	- Perangkat Lengkap - SDM Perangkat - Partisipasi Masyarakat	Kurang maksimalnya kerjasama antar desa
9.	Sarana Dan Prasarana Kantor Desa	- Perangkat Lengkap - SDM Perangkat	Kurangnya Sarana Prasarana Kantor Desa
10.	SDM perangkat Desa	- Perangkat Lengkap	Minimnya SDM Perangkat Desa
11.	Pengelolaan kearsipan Desa	- SDM Perangkat	Arsip Desa belum tertata dengan rapi
12.	Arsip administrasi kependudukan	- SDM Perangkat	Pengurusan administrasi kependudukan masih sulit Belum tertata baik
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
A. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa			
1.	Jalan Raya Desa	- Adanya pemukiman masyarakat	Jalan Raya Desa Wonoasri banyak yang rusak
2.	Jalan Pemukiman Desa	- Adanya pemukiman masyarakat	Jalan Pemukiman Desa di Dusun Kraton dan Dusun Curahlele Perlu Pengerasan dan Pengaspalan
3.	Jalan Desa Antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian	- Lahan Persawahan Yang subur - Hasil Pertanian	Jalan Pemukiman Desa di Dusun Kraton dan Dusun Curahlele Perlu Pengerasan dan Pengaspalan
4.	Saluran Air Tepi Jalan raya	- Tenaga Masyarakat - Swadaya Masyarakat	Saluran Air Tepi Jalan Raya Wilayah Desa Wonoasri Perlu perbaikan
5.	Saluran Air Tepi Jalan Pemukiman Desa	- Adanya pemukiman masyarakat	Saluran Air Tepi Jalan Pemukiman Perlu Perbaikan, Normalisasi dan Masih ada jalan yang belum ada saluran air

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
6.	Saluran Air Tepi Jalan Wilayah Pertanian	- Lahan Persawahan Yang subur - Hasil Pertanian	Saluran Air Tepi Jalan Wilayah Pertanian Perlu Perbaikan, Normalisasi dan Masih ada jalan yang belum ada saluran air
7.	Jembatan Penghubung Di Wilayah Desa	- Adanya Sektor Ekonomi yang semakin meningkat	Jembatan di Wilayah Wonoasri banyak yang rusak
8.	Lapangan Olah raga Sepak Bola dan Voli	- Klub Sepak Bola - Klub Bola Voli - Karang Taruna	Lapangan Sepak Bola peninggian dan perbaikan, Lapangan Voli perlu perbaikan.
9.	Balai Dusun Curahlele	- Perangkat Desa	Belum adanya teras balai dusun curahlele
10.	Ruangan Sekretariat Kantor Desa Dan Balai Desa	- Adanya perangkat yang lengkap - SDM Perangkat	Perlu penataan dan pengecatan di ruang sekretariat dan balai desa
11.	Balai Dusun Curahlele	- Tenaga Masyarakat - Swadaya Masyarakat	Balai dusun Curahlele belum memiliki pagar dan kekurangan mebeler
12.	Musholla-mushola Desa Wonoasri	- Jama'ah Sholat di Musholla - Kegiatan Mengaji	Banyak Musholla di Desa Wonoasri rusak
B. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa			
1.	Puskesmas Pembantu Desa Wonoasri	- Adanya Tenaga Medis - Swadaya Masyarakat	- PUSTU Dusun Kraton belum memiliki pagar keliling - PUSTU Dusun Kraton kekurangan mebeler - Halaman PUSTU masih berupa tanah perlu di Paving - PUSTU Desa Wonoasri belum memiliki mobil ambulance
2.	MCK di Desa Wonoasri	- Tenaga Masyarakat - Swadaya Masyarakat	- Banyak warga yang buang hajat di sungai - Belum ada MCK yang memadai
3.	Kesehatan lansia	- Adanya Lansia - Kelompok Lansia	Banyak lansia kurang sehat di Desa Wonoasri
4.	Gizi Ibu dan Balita	- Puskesmas pembantu - Posyandu	Masih ada ibu dan balita kurang sehat

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
5.	Posyandu	- Puskesmas pembantu - Kader Posyandu	Belum memiliki gedung yandu
6.	Penyuluhan bahaya Narkoba	- Pemuda - Swadaya Masyarakat	Banyak pemuda yang memakai Narkoba
7.	Kelompok Peduli ASI	- Puskesmas pembantu - Kader Posyandu	Pengetahuan akan ASI masih minim
C. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan Desa			
1.	Sarana Prasarana TK/PAUD/RA	- Adanya Siswa - Tenaga Pengajar	Sarana dan Prasarana TK/PAUD/RA kurang memadai
2.	Program kejar Paket B dan C	- Masyarakat Buta Huruf - Tenaga Pengajar	Banyak warga yang tidak melanjutkan di tingkat SMP dan SMA
3.	POS PAUD	- Siswa PAUD - Tenaga Pengajar	- POS PAUD belum berjalan maksimal - POS PAUD Desa belum memiliki gedung sendiri
4.	MIM 03 Wonoasri	- Adanya Siswa - Tenaga Pengajar	Ruang kelas MIM 03 Wonoasri banyak yang rusak
5.	MI Nurussalam	- Adanya Siswa - Tenaga Pengajar	MI Nurussalam kekurangan Ruang Kelas
6.	Sarana Prasarana MI, SMP dan SMK di Desa Wonoasri	- Adanya Siswa - Tenaga Pengajar	MI, SMP dan SMK kekurangan Komputer
7.	Penyediaan Beasiswa Siswa Miskin	- Adanya Siswa - Tenaga Pengajar	Banyak siswa putus sekolah
8.	Kelompok Kesenian Islam	- Kelompok Kesenian Islam - Swadaya Masyarakat	Kelompok kesenian rebana kekurangan alat rebana
9.	Kegiatan Bersih Desa Atau Suroan	- Tradisi Masyarakat - Swadaya Masyarakat	Kegiatan Bersih Desa belum berjalan Maksimal
10.	Kelompok Musik Karang Taruna	- Hiburan Masyarakat - Kelompok Musik	- Kelompok Musik Karang Taruna kekurangan alat music - Kelompok Musik Karang Taruna kekurangan alat sound sistem musik
11.	Kegiatan HUT RI	- Swadaya Masyarakat - Partipasi Masyarakat	Kegiatan berjalan kurang maksimal

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
D. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi			
1.	Kelompok Tani	- Hasil Pertanian - Kelompok Petani	- Pengelolaan tanah pertanian belum maksimal, kurangnya alat produksi pertanian, traktor, pompa air, hand Prayer - Kekurangan bibit padi dan palawija yang unggul - Hasil pertanian rendah
2.	Peternak Kambing	- Kelompok Peternak - Produksi Ternak	- Peternak kekurangan bibit unggul - Kekurangan sarana dan prasarana
3.	Peternak Sapi	- Kelompok Peternak - Produksi Ternak	- Peternak kekurangan bibit unggul - Kekurangan sarana dan prasarana
4.	Peternak Lele	- Kelompok Perikanan - Produksi Perikanan	- Peternak kekurangan bibit unggul - Kekurangan sarana dan prasarana
E. Pelestarian Lingkungan Hidup			
1.	Karang kitri	- Lahan Pekarangan	Banyak lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara maksimal
2.	Pintu masuk desa	- Swadaya Masyarakat - Tenaga Masyarakat	Pintu masuk desa kurang rapi dan indah
3.	Kegiatan Tanggap Bencana Banjir	- Masyarakat Peduli Bencana - Gotong Royong	Sering terjadinya banjir saat musim penghujan
4.	Daerah Aliran Sungai	- Swadaya Masyarakat - Tenaga Masyarakat	Terjadi pendangkalan aliran sungai
III BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT			
1.	Koperasi Peternakan	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	Pengurus lengkap namun belum berjalan maksimal
2.	Karang Taruna	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	Kuarganya dukungan secara materil
3.	LPM Desa Wonoasri	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	LPMD belum berjalan secara maksimal
4.	PKK Desa Wonoasri	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	PKK belum berjalan secara maksimal

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
5.	Griya Asih dan PKDRT	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	Perlu peningkatan kegiatan
6.	Kelompok Dasa Wisma	- Pengurus Lengkap - SDM Pengurus	Perlu peningkatan kegiatan
7.	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	- Swadaya Masyarakat - Gotong Royong	Keamanan lingkungan masih kurang
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Tenaga Pengajar	- Kurangnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Desa Wonosari - Minimnya Honor Guru PAUD
3.	Keterampilan Pemuda	- Banyaknya Pemuda Desa	- Banyak pemuda yang tidak punya keterampilan - Banyak pemuda yang belum memiliki keterampilan otomotif
4.	SDM perangkat Desa	- Perangkat Lengkap - SDM Pengurus	Minimnya SDM Perangkat Desa
5.	Pelatihan pembuatan pupuk organik	- Banyaknya Kotoran Ternak - Kelompok Petani	Mahal dan langkanya PUPUK Kimia
6.	Kelompok Petani	- Lahan Pertanian - Kelompok Petani	Kelompok Petani belum berjalan maksimal Produksi Petani jamur belum maksimal
7.	Kelompok Peternak	- Produksi Peternakan - Kelompok Peternak	Kelompok Peternak belum berjalan maksimal
8.	Kelompok Perikanan	- Hasil Perikanan - Kelompok Perikanan	Kelompok Perikanan belum berjalan maksimal
9.	Pelatihan Jahit dan Bordir	- Adanya Ibu-ibu rumah tangga - Swadaya Masyarakat	Ibu-ibu rumah tangga masih minim keterampilan
10.	Usaha kerajinan	- Kelompok Industri Kecil - Produksi Hasil Kerajinan - Pasar luas	Sektor industri kerajinan masih minim

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Membangun Desa Bersama Rakyat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis, Profesional Dan Transparan

4.1.1. Visi

Visi adalah gambaran atau cita-cita bersama mengenai masa depan, berupa kesepakatan dan komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Dalam kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan dalam perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Desa Wonoasri secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Wonoasri melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Wonoasri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat artinya tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam lingkungan yang aman dan damai. Sedangkan mewujudkan Pemerintahan yang bersih artinya di setiap pelaksanaan program kegiatan desa selalu dilakukan secara bertanggung jawab dan menghindari terjadinya korupsi. Demokratis artinya selalu membangun komunikasi dengan warga masyarakat melalui musyawarah dalam menentukan kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Desa. Profesional artinya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan hasil yang maksimal untuk kepentingan masyarakat Desa Wonoasri. Transparan artinya setiap kegiatan program pembangunan di Desa Wonoasri dilaksanakan secara terbuka dengan membuka akses informasi seluas-luasnya.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Wonoasri, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Wonoasri sebagai berikut :

"Membangun Desa Bersama Rakyat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis, Profesional Dan Transparan ".

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Wonoasri. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Wonoasri yang sejahtera dengan hasil pertanian, peternakan yang melimpah sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang dinamis , aman, tentram , bijak dalam mengelola lingkungan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

4.1.2. Misi

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Wonoasri merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi.

Untuk terwujudnya Visi tersebut ditetapkan lima upaya atau cara atau misi yang akan mendukung pencapaian visi desa Wonoasri. Adapun misi desa Wonoasri tersebut adalah :

1. Mewujudkan pembangunan desa yang berdaya guna dan bermanfaat serta berkesinambungan
2. Berperan aktif dalam peningkatan pendidikan formal dan non formal
3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang produktif dan kreatif
4. Mewujudkan dan menumbuh kembangkan olah rag.a, sosial budaya, kesenian dan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, bersih serta berfungsi sebagai pelayanan yang profesional dan melayani masyarakat.

4.2. Kebijakan Pembangunan

Pemerintah desa sangat diharapkan mampu sebagai penggerak dan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kedudukan desa sangat setrategis karena desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa, keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat maka dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, maka penerapan pembangunan partisipatif merupakan jawaban yang tepat untuk dilakukan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Pembangunan desa harus dilihat sebagai :

1. Upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat.
2. Upaya mempercepat pembangunan ekonomi desa yang efektif dan kokoh.

Pembangunan desa bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan serba keterkaitan sektor dan aspek diluar desa (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial budaya dan non sosial budaya).

Kebijakan pembangunan desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, yaitu :

1. Bidang Pendidikan
 - Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf
 - Pembangunan sarana pendidikan mulai play group, TK, SD, SMP, dan SMK beserta fasilitas pendukungnya.
 - Pembangunan Sanggar Belajar Bersama .
 - Pengembangan Perpustakaan Desa.
2. Bidang Kesehatan
 - Pembangunan MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga.
 - Meningkatkan pelayanan kesehatan di Posyandu, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
 - Meningkatkan pelayanan balai yandu dengan mendorong partisipasi Ibu dan balita dengan target terbangunnya 3 gedung balaiyandu 5 tahun kedepan.
 - Penyediaan sarana transportasi untuk warga yang kurang mampu.
 - Penyediaan Ambulance Pustu
- b. Mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan
 1. Mengupayakan semua lahan yang ada terjangkau oleh irigasi .
 2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan pembangunan saluran baru.
 3. Memanfaatkan lahan tidur yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Dinas pertanian dan pihak swasta.
 4. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
 5. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.
 6. Intensifikasi pengelolaan tambak lele dan gurami.

- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK, Jama'ah Tahliil, Koperasi wanita, SPP.
 2. Mengupayakan kerja sama dengan pemilik modal, pasar dan sumber bahan baku.
 3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan - pelatihan atau kursus-kursus kewirausahaan .
 4. Meningkatkan daya saing usaha - usaha pedesaan melalui berbagai pelatihan tentang pemasaran dan pemakingan.
 5. Pendirian BUMDES sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam pengembangan usaha.

4.2.2. Program Pembangunan Desa

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama lima tahun bagi Desa Wonoasri. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari 2 dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat penting merupakan inti dari RPJM Desa Wonoasri

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Wonoasri

Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri selama lima tahun (2016 – 2021) sebagaimana dalam lampiran.

4.2.3. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Wonoasri sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana, politik sosial budaya ,ekonomi dan kebencanaan, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa, seperti PNPM, APBN, APBD, ADD, SKPD, Swadaya, kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN dan lain sebagainya.

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan perangkatnya, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

Strategi pencapaian target pembangunan yang meliputi waktu pelaksanaan, sumber dana, sasaran, penanggungjawab dan bentuk evaluasi pertanggungjawaban, dijelaskan secara detail pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan atau perencanaan program desa sangat penting untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pemerintah desa, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jika pemerintah desa mempunyai kebijakan dan tugas dalam bidang pembangunan, maka dengan sendirinya pemerintah desa harus menggarap program atau proyek terkait.

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2021, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama lima tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Wonoasri tahun 2016 – 2021 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa Wonoasri tahun 2016 – 2021 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Kepala Desa Wonoasri



SUGENG PRIYADI

XIV. FORMAT RANCANGAN RUM DESA

RANCANGAN RUM DESA
TAULUR : 2016-2021

DESA : WONGABRI
KECAMATAN : TEMPUREJO
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praduan Volume	Sasaran/ Mirebut	Waktu Pelaksanaan					Waktu Biaya dan Sumber Pendanaan			Pembinaan Pola Pelaksanaan				
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2016	2017	2018	2019	2020	2021	JH (Rp)	Sumber	Swakelola	Kapasitas Arah Dana	Kapasitas Pihak Ketiga		
																		2016	2017
1	Peningkatan Peningkatan Desa	a. Kegiatan Desa	Mengarahkan Arah Desa Percepatan dan Percepatan Desa	Desa Wiroso	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	16.000.000	ADD	V				
			Percepatan Pengiriman Percepatan Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	7.500.000	ADD	V			
2	Peningkatan Desa	b. Peningkatan Desa	Peningkatan Percepatan Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V			
			Peningkatan BUM Desa	Desa Wiroso	1 Paket	Masyarakat	V								2.500.000	ADD	V		
			Peningkatan APH Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	9.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Percepatan Desa dan Percepatan Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa dengan Kelemb. Dan/Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa Percepatan	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa Desa Change	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
			Peningkatan dan peningkatan Percepatan Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa Percepatan Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa Percepatan Desa	Desa Wiroso	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
			Peningkatan Desa Percepatan Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD	V		
			3	Peningkatan Desa	c. Peningkatan Desa	Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD	V
Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	6 Paket				Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	6 Paket				Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	6 Paket				Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	6 Paket				Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
Kegiatan Pengiriman Kelemb. Desa	Desa Wiroso	6 Paket				Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
4	Peningkatan Desa	d. Peningkatan Desa	Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V			
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	40.000.000	ADD	V		
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
5	Peningkatan Desa	e. Peningkatan Desa	Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V			
			Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa Wiroso	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Bobot Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa)	Pakaian Monev	Respon/ Monev	Waktu Pelaksanaan					Profilman Rata-rata dan Sumber		Profilman Pokok Pelaksanaan		
								2015	2017	2018	2019	2020	2021	Jth Rjth	Sumber	Skala/da	Kepuasan Ratar Rata
					Desa Wonorejo	5 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
					Desa Wirodadi	5 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
					Desa Wirodadi	1 Paket	Masyarakat	V					3.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	5 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	6 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	6 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	3 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	7.200.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	6 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	6 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat						300.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	5 Paket	Pengingat Desa	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	2 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	7.200.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	2 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	5 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	3 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	20.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	3 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	10.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	10 orang	Pengingat Desa	V	V	V	V	V	2.178.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	10 orang	Pengingat Desa	V	V	V	V	V	348.000.000	PRD	V		
					Desa Wonorejo	10 orang	Pengingat Desa	V	V	V	V	V	360.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	11 orang	Anggota DPRD	V	V	V	V	V	430.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	62 orang	RT/RW	V	V	V	V	V	1.115.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	5 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	6 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	15.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	50 Orang	Pengingat Desa, DPRD, LPM	V	V	V	V	V	50.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	50 orang	Pengingat Desa, DPRD, LPM	V	V	V	V	V	50.000.000	ADD	V		
					Desa Wonorejo	62 orang	Lincaas	V	V	V	V	V	840.000.000	ADD	V		

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (Desa / District)	Problema / Volume	Dana / Merit	Waktu Pelaksanaan					Pembelian Bahan dan Waktu		Pembelian Perak Pahlawan													
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jm. (Rp)	Unit	Revisi	Revisi											
1	Bidang Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Desa Wicaksono	10 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V												
																Perbaikan Ujung Lembang	Desa Wicaksono	30 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V
																Perbaikan Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Ekosistem Operasional	Desa Wicaksono	3 Unit	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	64.800.000	ADD	V
																Perbaikan Hutan Tanaman / Tanaman Alif / Intermedier	Desa Wicaksono	2 orang	Tripartit Alif	V	V	V	V	V	60.000.000	ADD	V
																Perbaikan Hutan Tanaman	Desa Wicaksono	1 orang	Operasi	V	V	V	V	V	108.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	11 orang	Anggota BPO	V	V	V	V	V	16.500.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	11 orang	Anggota BPO	V	V	V	V	V	30.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	5 paket	Meperak	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	5 paket	Meperak	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	5 paket	Meperak	V	V	V	V	V	12.000.000	ADD	V
2	Bidang Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V												
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
3	Bidang Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V												
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V
																Perbaikan dan Peningkatan Saranitas BPO	Desa Wicaksono	31 orang	Peningkatan Desa	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW / Dusun)	Frekuensi Volume	Saarany/ Mulaikat	Waktu Pelaksanaan					Pelayanan Masyarakat		Prestasi/ Rata-Rata		Prestasi/ Rata-Rata	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jth (Rt)	Bundar	Siapa/ Rata-Rata	Prestasi/ Rata-Rata	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jth (Rt)	Bundar	Siapa/ Rata-Rata	Prestasi/ Rata-Rata	
		Pembangunan Jalan Bina RT 003 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 1200 M	273 KK	V	V	V	V	V	400.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Halmi RT 004 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 1700 M	158 KK	V	V	V	V	V	267.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 005 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 400 M	223 KK	V	V	V	V	V	861.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 006 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 450 M	133 KK	V	V	V	V	V	350.700.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 007 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1000 M	427 KK	V	V	V	V	V	300.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 008 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	20 M	100 Sevan	V	V	V	V	V	6.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 009 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2200 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	770.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 010 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	700.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 011 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	420 KK	V	V	V	V	V	600.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 012 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	420 KK	V	V	V	V	V	600.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 013 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	4000 M	573 KK	V	V	V	V	V	1.200.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 014 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	221 KK	V	V	V	V	V	600.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 015 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1400 M	2742 KK	V	V	V	V	V	1.200.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 016 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1500 M	427 KK	V	V	V	V	V	150.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 017 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1000 M	1900 KK	V	V	V	V	V	450.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 018 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	421 KK	V	V	V	V	V	600.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 019 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3000 M	427 KK	V	V	V	V	V	900.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 020 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	2000 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	2.000.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 021 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	8000 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	4.500.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 022 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1000 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	1.000.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 023 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1000 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	1.000.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 024 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1400 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	1.270.200.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 025 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 3 M	409 KK	V	V	V	V	V	22.500.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 026 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	3 M x 2 M	143 KK	V	V	V	V	V	22.500.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 027 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1 unit	Masyarakat	V	V	V	V	V	100.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			
		Pembangunan Jalan Bina RT 028 Dusun Kertan		Dusun Kertan RW 025	1 unit	Masyarakat	V	V	V	V	V	100.000.000	ADD / DD /APRD Kab	V			

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Sifat Kegiatan	Jenis Kegiatan	Estimasi (RT/IR/ Datas)	Pakaian Volume	Sasaran/ Manfaat	Makna Pelaksanaan					Pembelian Bahan dan Pembelian		Pembelian Posa Pelaksanaan	
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jth RpJ	Detailer	Revisi/Amor Dosa
		Pengadaan perlengkapan jalan		Dasa Wicakari	125 titik	Masyarakat		V	V	V	V	V	1.475.000.000	APRD Kab dan Dinas		
		Rehabilitasi Capura Dasa		Dasa Wicakari	1 unit	Masyarakat		V					30.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Gedung Dasa Cereble		Dasa Wicakari	1 unit	Masyarakat		V					30.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Sistem Promosi TPJ Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	8 Lembar	Stasi		V	V	V	V		200.000.000	APRD Kab/APRD Prop/Revisi		V
		Pembangunan area Wi		Dasa Wicakari	1 Paket	Masyarakat		V					15.000.000	APRD		V
		Rehabilitasi rumah tidak layak huni		Dasa Wicakari	150 (1/1)	Masyarakat		V	V	V	V		1.500.000.000	ADD/DC/APRD Kab/APRD Prop		V
		Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola		Dasa Wicakari	1 unit	Masyarakat		V					30.000.000	ADD/DC/APRD Kab/APRD Prop		V
		Rehabilitasi Lapangan Voly		Dasa Wicakari	1 Unit	Masyarakat		V					20.000.000	APRD Kab dan Dinas		V
		Pembangunan Teras Dasa Dasa Cereble		Dasa Wicakari	1 Unit	Masyarakat		V					25.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Skorsipal Kantor Dasa Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	1 Paket	Masyarakat		V	V	V	V		400.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Rumah Dasa Kipale Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	7 M x 10M	Masyarakat		V					210.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan ruang dan kabin Dasa, Revisi Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	04 X 20M	Masyarakat		V	V				540.000.000	APRD Kab		V
		Pembangunan pagar keliling dan tembok Dasa Dasa Cereble		Dasa Wicakari	1 paket	Masyarakat		V					25.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Rehabilitasi Multiab Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	10 unit	Masyarakat		V	V	V	V		150.000.000	ADD/DC/APRD Kab dan Dinas		V
		Kantor & Balai Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	1 unit	Masyarakat		V					200.000.000			
		Pembangunan POB Masing		Dasa Wicakari	48 Unit	Masyarakat		V	V	V	V		480.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Perumahan Dasa Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	2,5 M x 9,5 M	3000 KK		V	V				71.500.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pengadaan mobil (10/17)		Dasa Wicakari	1 paket	2000 KK		V					30.000.000	ADD/APRD Kab/APRD Prop		V
		Pembangunan Perang (10/17)		Dasa Wicakari	1 unit	Masyarakat		V					75.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pengadaan Ambulance (10/17)		Dasa Wicakari	1 Bus	3000 KK		V					250.000.000	APRD		V
		Pembangunan MCK Dasa Wicakari		Dasa Wicakari	10 Unit	400 KK		V	V	V	V		20.200.000	APRD		V
		Pembangunan kesehatan lansia		Dasa Wicakari	1 paket	100 orang		V	V	V	V		60.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan OHS dan SSB		Dasa Wicakari	1 paket	150 Babak		V	V	V	V		72.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan Gedung Kaca		Dasa Wicakari	1 Unit	20 Babak		V					84.000.000	ADD / DD /APRD Kab		V
		Pembangunan balok beton		Dasa Wicakari	6 paket	Masyarakat		V	V	V	V		60.000.000	APRD Kab		V

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan										Pembelian Benda Baru/ Rencanan		Pembelian Pula Pelaksanaan	
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (K/ RW/ Dusun)	Frekuensi Volume	Sesuai/ Maksimal	2015	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp)	Bentuk	Kategori Anggaran Dana	Kategori Pula Dana	
							V	V	V	V	V	V					
			Kegiatan Swadaya Masyarakat Pokok Asli	Desa Wirocanan	1 unit	40 Orang	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD / DD / APBD Kab	V			
			Pembinaan Sumur Bor Artesis dan Tandon Air	Desa Wirocanan	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	300.000.000	APESU /Kab/ APBD Prov. Jember	V			
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan Desa	Desa Wirocanan	3 Lembar	Biaya	V	V	V	V	V	750.000.000	APRD	V		V	
			Pengadaan Program Kerja Pokok D dan C	Desa Wirocanan	6 paket	50 Orang	V	V	V	V	V	30.000.000	APRD /Kab/ APBD Prop.			V	
			Pembinaan PKB PAUD	Desa Wirocanan	1 unit	Orang	V	V	V	V	V	105.000.000	ADD / DD / APBD Kab	V			
			Pengadaan Gedung PAUD Krawaga	Desa Wirocanan	2 M x 12 M	30 Siswa	V	V	V	V	V	130.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pengadaan APE Paud	Desa Wirocanan	5 Paket	200 Siswa	V	V	V	V	V	100.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Rehabilitasi Gedung Sekolah	Desa Wirocanan	1	120 Siswa	V	V	V	V	V	400.000.000	APRD	V			
			Melaku Perbaikan SD	Dusun Krayan RW 003	40 Unit	121 Siswa	V	V	V	V	V	50.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pengadaan Gedung/Peningkatan Muranakan	Dusun Krayan RW 002	7 M x 7 M	30 Siswa	V	V	V	V	V	100.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pengadaan Komputer SD/MS, SMP dan SMA	Desa Wirocanan	20 Unit	8 Lembar	V	V	V	V	V	200.000.000	APRD	V			
			Pengadaan Mebel SD/MS, SMP, SMA	Desa Wirocanan	8 Paket	8 Lembar	V	V	V	V	V	500.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Proyeksi Hutan/ Sisa Makhluk	Desa Wirocanan	1 paket	30 Siswa	V	V	V	V	V	300.000.000	ADD/ APBD /Kab/ APBD Prop. dan Swadaya	V			
			Pengaliran air masuk rumah	Desa Wirocanan	5 unit	5 Kolongok	V	V	V	V	V	360.000.000	APRD	V			
			Ngatlan Benda Desa Atas Survei	Desa Wirocanan	1 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	75.000.000	APRD /Kab/ dan Swadaya	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Desa Wirocanan	1 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	120.000.000	Swadaya	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Dusun Krayan	1 unit	1 Kolongok	V	V	V	V	V	50.000.000	APRD /Kab/ dan Swadaya	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Dusun Krayan	1 unit	1 Kolongok	V	V	V	V	V	30.000.000	APRD /Kab/ dan Swadaya	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Desa Wirocanan	6 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	180.000.000	APRD /Kab/ dan Swadaya	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Desa Wirocanan	1 paket	1 Kolongok	V	V	V	V	V	100.000.000	DHMA 365A	V			
			Pengaliran air ke arah sungai	Desa Wirocanan	1 paket	1 Kolongok	V	V	V	V	V	750.000.000	ADD/ DD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pembinaan Gedung Bureha	Desa Wirocanan	1 unit	Masyarakat	V	V	V	V	V	250.000.000	ADD/ DD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pembangunan pasar Desa	Dusun Krayan	3 LDR	Masyarakat	V	V	V	V	V	375.000.000	ADD/ DD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			
			Pembangunan Sarana Air Ekonomi Rakyat	Kepungutan Desa Wirocanan	1 unit	Masyarakat	V	V	V	V	V	700.000.000	ADD/ DD/ APBD /Kab/ APBD Prop.	V			

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Preliminary Volume	Sasaran/ Menerima	Masa Pelaksanaan					Praktikum Teori dan Simulasi		Praktikum Peta Pelaksanaan				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp)	Bentuk	Kejelasan Antar Desa	Kejelasan Peta Desa		
1. Penelitian Keperawatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Devis Wawancara	9 paket	9 kelompok	V	V	V	V	V	600.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	9 paket	9 kelompok	V	V	V	V	V	400.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	1 paket	3 kelompok		V	V	V	V	V	300.000.000	ARPD			V
				Devis Wawancara	1 paket	3 kelompok	V	V	V	V	V	V	700.000.000	ARPD			V
				Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V	V	V	V	V	V	45.000.000	ARPD			V
				Devis Wawancara	6 paket	Mengunjungi	V	V	V	V	V	V	260.000.000	ARPD/RSJ/ARPD			V
				Devis Wawancara	1 unit	Mengunjungi	V						30.000.000	ARPD/RSJ/ARPD			V
				Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V	V	V	V	V	V	60.000.000	ARPD			V
				Devis Wawancara	5000 M	Mengunjungi	V	V	V	V	V	V	2.750.000.000	ARPD			V
				Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V	V	V	V	V	V	47.493.200.000	ARPD			V
				2. Penelitian Komunikasi	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Devis Wawancara	1 paket	1 kelompok	V	V	V	V	V	60.000.000	ARPD Prop
Devis Wawancara	1 paket	1 kelompok	V					V	V	V	V	24.000.000	ARPD/RSJ			V	
Devis Wawancara	1 paket	1 kelompok	V					V	V	V	V	18.000.000	ARPD/RSJ			V	
Devis Wawancara	1 paket	1 kelompok	V					V	V	V	V	22.000.000	ARPD / DD			V	
Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V					V	V	V	V	18.000.000	ARPD / DD			V	
Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V					V	V	V	V	94.000.000	ARPD / DD			V	
Devis Wawancara	1 paket	Mengunjungi	V					V	V	V	V	50.000.000	ARPD / DD			V	
Devis Wawancara	2 orang	ORU	V					V	V	V	V	V	278.000.000	ARPD/ARPD			V
Devis Wawancara	3 orang	Orsu	V					V	V	V	V	V	180.000.000	ARPD/ARPD			V
Devis Wawancara	6 Paket	Mengunjungi	V					V	V	V	V	V	25.000.000	ARPD			V
4. Penelitian Masyarakat	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan					Devis Wawancara	1 paket	10 orang	V	V	V	V	V	30.000.000	ARPD
				Devis Wawancara	9 paket	0 kelompok	V	V	V	V	V	60.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	9 paket	9 kelompok	V	V	V	V	V	120.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	1 paket	7 kelompok	V	V	V	V	V	30.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	2 paket	3 kelompok	V	V	V	V	V	30.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	1 paket	7 orang	V	V	V	V	V	21.000.000	ARPD			V	
				Devis Wawancara	1 paket	10 orang	V	V	V	V	V	10.000.000	ARPD			V	

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/Desa/Desa)	Pembinaan/Manfaat	Masa Pelaksanaan					Pembelian Harga dan Jumlah		Pembelian Pula Pelaksanaan		
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			2016	2017	2018	2019	2020	2021	th. Rp	Subsidi	Revisi/Amal/Don	Keputusan Pukul/Grupa
		Peningkatan kualitas dan pembinaan siswa terampil	Desa Wincayan	10 banyolan	V	V	V	V	V	30.000.000	APRD			
		Pelatihan Budidaya Jambur	Desa Wincayan	10 orang	V	V	V	V	V	15.000.000	Sub/APRD Prop	V		
		Pelatihan perikanan	Desa Wincayan	10 orang	V	V	V	V	V	30.000.000	Sub/APRD Prop		V	
Jumlah Per Bidang *										644.000.000				
JUMLAH TOTAL										35.435.000.000				

Wincayan, Desember 2016
 Kepala Desa

 ABOTUL HAJIMAN

Mercusuar, Desember 2016
 Kepala Desa

 BRIGITANYA SARI

